DR. IR. JUNAIDI, M.SI • DR. IR. ABDULLAH MUNZIR, M.SI • DR. UNING PRATIMARATRI, M. HUM

PROFIL KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL DI PADANG



Bung Hatta University Press

Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang

BUNG HATTA UNIVERSITY PRESS

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang

Dr. Ir. Junaidi, M.Si

Penerbit

Bung Hatta University Press

2017

Judul : **Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang**

Penulis : **Dr. Ir. Junaidi, M.Si**

Sampul : Dr. Ir. Junaidi, M.Si

Perwajahan: Bung Hatta University Press

Diterbitkan oleh Bung Hatta University Press Juni 2017

Alamat Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta

Bung Hatta University Press Gedung Rektorat Lt.III

(LPPM) Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia

Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475

e-mail: lppm_bunghatta@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Cetakan Pertama : Juni 2017

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang,

Oleh : Dr. Ir. Junaidi, M.Si, Bung Hatta University Press, Juni 2017

130 Hlm + xvi ; 14,8 cm

ISBN 978-602-7805-49-1

SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Visi Universitas Bung Hatta adalah menjadikan Universitas Bung Hatta Bermutu dan terkemuka dengan misi utamanya meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berada dalam jangkauan funsinya. Mencermati betapa beratnya tantangan universitas Bung Hatta terhadap dampak globalisasi, baik yang bersumber dari tuntutan internal dan eksternal dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, maka upaya peningkatan kualitas lulusan universitas Bung Hatta adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan terencana dan terukur. Untuk mewujudkan hal itu Universitas Bung Hatta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merancang program kerja dan memberikan dana kepada dosen untuk menulis buku, karena kompetensi seorang dosen tidak cukup hanya menguasai bidang ilmunya dengan kualaifikasi S2 dan S3, kita di tuntut untuk memahami elemen kompetensi yang bisa diaplikasi dalam proses pembelajaran. Melakukan riset dan menuangkan dalam bentuk buku.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Saudara **Dr. Ir. Junaidi, M.Si** yang telah menulis buku "**Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang**". Harapan saya buku ini akan tetap eksis sebagai wahana komunikasi bagi kelompok dosen dalam bidang ilmu "**Perikanan**" sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar untuk mata kuliah yang di ampu dan menambah kasanah ilmu pengetahuan mahasiswa.

Tantangan kedepan tentu lebih berat lagi, karena kendala yang sering di hadapi dalam penulisan buku ini adalah tidak di punyainya hasil-hasil riset yang bernas. Kesemuanya itu menjadi tantangan kita bersama terutama para dosen di universitas Bung Hatta.

Demikianlah sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya yang kita perbuat bagi memajukan pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Padang, Juni 2017

Rektor

Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, Akt., MBA.

KATA PENGANTAR

Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang merupakan Hasil Penelitian Hibah Bersaing yang di Danai oleh Menristek Dikti selama 2 tahun (2015-2016) dengan tim riset Dr. Ir. Junaidi, M.Si, Dr. Ir. Abdullah Munzir, dan Dr. Uning Pratimaratri, M.Hum. Bahan tersebut sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam upaya memilih alternatif judul penelitian di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Bung Hatta dan di Pascasarjana Universitas Bung Hatta. Buku ini juga dapat digunakan dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Perikanan, Tataniaga Hasil Perikanan, Manajemen Operasi Penangkapan Ikan, dan Agribisnis Perikanan. Bahan ini diberikan pada semester dua, lima, dan semester tujuh di Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, dan semester satu di Pascasarjana Universitas Bung Hatta. Walaupun demikian, apa yang disajikan disini belumlah mencakup semua materi yang harus diberikan secara lengkap dalam satu semester. Oleh karena itu dipilih materi-materi yang sesuai dengan isu-isu utama dan bersifat khusus mengenai Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang. Untuk penyajian yang lebih komplek dan special diluar lingkup buku ini dapat dibaca pada buku-buku lain yang lebih lengkap.

Kami menyadari banyak kekurangan dan kelemahan buku ini dengan arti kata jauh dari kesempurnaan. Kritikan dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk kesempurnaannya. Terimakasih yang sangat dalam kami persembahkan kepada Bapak Prof. Dr. Niki Lukviarman, S.E.,Akt.,MBA selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan dorongan hingga terbitnya buku ini, dan Prof. Dr. Isril Berd, S.U sebagai editor, serta Ir. Mas Eriza, M.P selaku Dekan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta yang telah mengizinkan untuk membuat buku ini, direktur LPPM Dr. Ir. Abdullah Munzir, M.Si dan

Dr. Azrita, SP.i, MS.i beserta staf yang telah membantu lahirnya buku yang berjudul "*Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang*".

Padang, 10 Oktober 2016

Dr. Ir. Junaidi, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN REKTOR v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 2

BAB II Beberapa kajian Tentang Kemiskinan Nelayan 5

BAB III Profil Nelayan Kota Padang 15

3.1 Keadaan Umum Kota Padang 15

3.1.1 Hidrologi 17

3.1.2 Klimatologi 17

3.1.3 Jumlah Penduduk Kota Padang 18

3.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis dan Kelompok Umur 19

3.1.5 Sumbangan antar sektor Terhadap perekonomian Kota Padang 21

3.2 Sektor Perikanan Kota Padang 22

3.3 Analisis Faktor Internal Kemiskinan Nelayan 27

3.3.1 Kepemilikan Alat 27

3.3.2 Jenis Alat Tangkap Nelayan 29

3.3.3 Pendidikan nelayan di Kota Padang 31

3.3.4 Budaya 32

3.3.5 Pola Hidup Masyarakat Nelayan 34

3.3.6 Usaha wanita nelayan 35
3.3.7 Aset 36

BAB IV Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Dari Faktor Internal. 39

BAB V Kesimpulan dan Saran 41
5.1 Kesimpulan 41
5.2 Saran 41

BAB VI Faktor Eksternal Kemiskinan Nelayan Kota Padang 43
6.1 Visi dan Misi Kota Padang 43
6.2 Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 47
6.2.1 Penguatan Kelembagaan & Posisi Kelautan .....
Perikanan 48
6.2.2 Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan 49
6.2.3 Penguatan Pasar Dalam Negeri 49
6.2.4 Penguatan Pasar Ekspor 49
6.3 Permasalahan Sektor Perikanan 50
6.4 Faktor eksternal Kemiskinan Nelayan 55
6.4.1 Kebijakan Program Bantuan Kementeri Kelautan .....
Perikanan 55
6.5 Kebijakan Program Bantuan Kelautan dan .....
Perikanan Provinsi Sumatera Barat 59
6.5.1 Petunjuk Teknis (Juknis) Pengadaan 60
Gillnet Monofilament .....
6.5.2 Petunjuk Teknis (Juknis) Pengadaan Long Tail 69
6.5.3 Sub Kegiatan: Pengadaan Paket Bantuan Tramel .....
Net. 82
6.6 Kebijakan Program Bantuan Kelautan dan Perikanan .....
Kota Padang 99
6.7 Peranan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 100
6.8 Peranan Perusahaan Perikanan (PT. Dempo) 102

6.9 Peranan Pusat Pendaratan ikan dan Pelelangan Ikan 103
6.10 Peranan Eksportir ikan 106
6.11 Peran restoran dan Rumah Makan 107
6.12 Peranan UKM perikanan..... 109
6.13 Peran Lembaga Perguruan Tinggi..... 112
6.14 Model Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan .....
Ditinjau dari Perspektif Multi Dimensi di Kota Padang 116

BAB VII Kesimpulan dan Saran 121
7.1 Kesimpulan 123
7.2 Saran..... 124

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
2.1	Empat Kategori Penggolongan Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap dan Armada	7
3. 1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Pada Tahun 2010-2013 (orang)	18
3.2	Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Tahun 2013	20
3.3	Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2009 – 2013 (dalam %)	21
3.4	Jumlah Nelayan di Setiap Kecamatan di Kota Padang	22
3.5	Jumlah Alat Tangkap Ikan Menurut Jenis Tahun 2013	24
3.6	Jumlah Produksi Ikan Laut Menurut Jenis Tahun 2013	25
3.7	Jenis Alat Tangkap yang Digunakan Nelayan di Kota Padang	30
3.8	Kontribusi Usaha Wanita nelayan terhadap pendapatan Keluarga	35
3.9	Aset Kondisi Rumah Masyarakat Nelayan di Kota Padang	36
3.10	Kepemilikan Aset lain Masyarakat Nelayan	37
6.1	Rencana Anggaran Biaya Spesifikasi Teknis Jaring Kabupaten dan Kota	65
6.2	Rencana Anggaran Biaya Spesifikasi Teknis Jaring Kabupaten Mentawai	66
6.3	Harga Perkiraan Sendiri Spesifikasi Jaring Kabupaten dan Kota	67
6.4	Spesifikasi Alat Tangkap	68
6.5	Rencana Anggaran Biaya Long Tail	74
6.6	Spesifikasi Long Tail Kab. Mentawai	76
6.7	Harga Perkiraan Sendiri Kabupaten dan Kota	78
6.8	Spesifikasi Mesin Merk Robin	80

6.9 Lokasi Pendistribusian Bantuan Long Tail 81
6.10 Rencana Anggaran Biaya Jaring Udang (Tramel Net) Masing-Masing Kabupaten 90
6.11 Harga Perkiraan Sendiri Jaring Udang Masing-Masing Kabupaten 91
6.12 Jumlah Kk Miskin Di Kab/ Kota Wilayah Pesisir..... Data Bps Tahun 2008 93
6.13 Realisasi Penerima Program Gepemp Tahun 2012 93
6.14 Lokasi Sasaran Kota Padang 93
6.15 Paket yang diserahkan pada tahun 2012 di Kota Padang 94
6.16 Paket Gepemp tahun 2013 di Kota Padang 95
6.17 Daftar Penerima Gepem Tangkap 2013 Di Kota Pada..... 95
6.18 Kelompok Pengolah Ikan Kota Padang..... 110
6.19 Tabel 6.19 Jumlah Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Univ. Bung Hatta Tahun 2014 – 2016 Per Instansi 113
6.20 Jumlah Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Univ. Bung Hatta ..... Tahun 2014 - 2016 Per Bidang..... 114

perspektif multi dimensi di Kota Padang 118

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kota Padang sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dengan luas wilayah 1.414,96 km^2 yang terdiri dari 694,96 km^2 daratan dan 720,00 km^2 perairan laut. Dari sebelas kecamatan terdapat enam kecamatan terletak di kawasan pantai (Bappeda Kota Padang, 2011:8). Jumlah nelayan di Kota Padang sebanyak 5.856 orang, terdiri atas 2.472 orang nelayan tradisional, tergolong nelayan miskin. Nelayan merupakan asset strategis yang perlu diberdayakan agar dia dapat keluar dari kemiskinanan.

Oleh karena nelayan merupakan asset strategis berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah dalam upaya membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan seperti: bantuan alat dan kapal perikanan dimulai dari tahun 1980, dana bergulir dimulai pada tahun 1990, bantuan Modal Kerja Masyarakat Pesisir (MKPEMP) di tahun 2000, serta program gerakan pensejahteraan masyarakat pesisir (GEPEMP) yang diprakarsai oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat di tahun 2012. Berbagai bantuan telah diluncurkan oleh pemerintah, namun kehidupan masyarakat nelayan tidak banyak mengalami perobahan dari waktu kewaktu.

Dorongan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di sektor perikanan telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti: Pelabuhan Samudera Bungus, Pembangunan Industri Perikanan PT. Dempo, dan Fasiltas lainnya seperti PPI (Pusat Pendaratan Ikan) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) namun geliat tersebut masih belum kelihatan. Oleh karena pembangunan yang dilakukan masih bersifat sektoral dan terpusat, maka sangat perlu dilakukan penelitian strategi pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif multi dimensi di Kota Padang.

1.2 Tujuan

Tujuan dari buku ini adalah menggambarkan faktor kemiskinan nelayan dari sisi internal yaitu : kepemilikan alat tangkap: jenis alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan dan status kepemilikan, tingkat pendidikan: jenis pendidikan yang dilalui oleh nelayan selama menjadi nelayan, budaya: menyangkut kebiasaan hidup nelayan di dalam masyarakat pesisir, termasuk warisan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki, pola hidup: menyangkut pemanfaatan uang yang diperoleh serta penggunaan uang tersebut, usaha sampingan: aktifitas yang dilakukan oleh istri-istri nelayan dalam rumah tangga dalam upaya mencukupi kebutuhannya, peranan istri dan anak : kontribusi istri dan anak dalam meningkatkan pendapatan keluarga, dan dukungan sosial : peran nelayan dalam kehidupan

sosial menyangkut kegiatan kemasyarakatan, organisasi, sosial, kegotong royongan, dan acara sedekah laut, serta kepemilikan asset produktif : adalah kepemilikan asset oleh nelayan seperti: sawah, ternak, ladang, alat tangkap dan perahu. Dari sisi internal ini melihat kemiskinan dari diri masyarakat nelayan itu sendiri.

Selanjutnya buku ini juga melihat kemiskinan dari segi eksternal meliputi ; hulu dan hilir, KKP, sektor lainnya, usaha besar (industry), UKM, pusat dan daerah, pelabuhan perikanan. Faktor eksternal ini melihat pengaruh pengembangan perikanan tangkap melalui industrialisasi dan apa pengaruhnya terhadap masyarakat nelayan. Apakah bantuan selama ini tidak memberikan manfaat terhadap kehidupan nelayan, dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah tidak memberi manfaat terhadap hasil tangkapan mereka, serta faktor-faktor tidak termanfaatkannya semua sarana dan prasarana perikanan yang menyebabkan mereka sulit keluar dari kemiskinan atau semua faktor eksternal yang menyebabkan mereka tetap miskin. Faktor eksternal ini juga melihat peran stakeholder dalam mengembangkan sektor perikanan yang terdiri dari kebijakan pemerintah, peranan swasta dalam hal ini adalah industry perikanan, para eksportir berkelas dunia, masyarakat itu sendiri sebagai pelaku dan peranan perguruan tinggi sebagai lembaga penghasil lulusan bidang perikanan, peneliti, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Akhir dari hasil penelitian internal dan eksternal adalah bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan, maka dilakukan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan tersebut. Apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan mereka.

BAB 2
BEBERAPA KAJIAN TENTANG KEMISKINAN NELAYAN

Sangat ironis sekali Negara Indonesia yang memiliki kekayaan sumberhayati terbesar di dunia namun masyarakat nelayan yang tinggal dikawasan pesisir, merupakan masyarakat termiskin. Inilah yang menjadi pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Hasil penelitian Junaidi (1991) dan (2008) terhadap pembangunan tempat pelelangan ikan di Kota Padang hasil penelitian menunjukkan bahwa TPI hanya tempat memungut retribusi saja manfaat langsung tidak dirasakan oleh masyarakat. Hasil penelitian Junaidi (1992) terhadap paket bantuan alat tangkap di Desa malilimok di Kepulauan Mentawai hasil kajian menunjukkan bahwa setelah bantuan di berikan dan hasil tangkap meningkat namun terkendala dengan pemasaran, hal ini tidak member pengaruh terhadap kehidupan mereka. Kemajuan teknologi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap puse seine (pukat cincin) di air bangis mampu meningkatkan produksi hasil tangkapan, namun akibat kekurang infrastruktur seperti kekurang es, air bersih, tidak adanya cold storage, dan kendala pemasaran, kemajuan teknologi juga tidak membawa pengaruh terhadap masyarakat nelayan (Junaidi,1992).

Penelitian terhadap factor-faktor penyebab kemiskinan nelayan yang dilakukan Junaidi (1994) di dua desa pantai yaitu: di desa maju dan di desa tertinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan miskin di desa maju lebih miskin dibandingkan dengan di desa tertinggal. Hal ini terjadi disebabkan di desa tertinggal sebenarnya nelayan lebih sejahtera di bandingkan desa maju. Di desa tertinggal sebenarnya nelayannya lebih baik kehidupannya, oleh karena mengharapkan bantuan, maka statusnya desa maju di robah menjadi desa tertinggal. Sementara itu oleh karena desa maju terletak di ibukota kecamatan maka statusnya menjadi desa maju. Selain itu penyebab kemiskinan nelayan adalah pola hidup, jumlah tanggungan yang banyak, tidak adanya bantuan dari rantau, serta strukturalnya yang menyebabkan mereka miskin. Lebih lanjut Junaidi (2005) mengemukakan bahwa factor kemiskinan juga disebabkan adanya permainan agen di dalam pemasaran hasil tangkapan nelayan, dimana harga tidak berkointegrasi antara suatu pasar dengan pasar lainnya. Harga dikuasai oleh agen, dan keuntungan terbesar di pegang oleh agen, dan adanya praktek ketidak jujuran dalam system pembayaran.

Peneliti lain melihat dari segi budaya seperti yang dikemukakan oleh Satria (2009) menyatakan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir dapat dibagi menjadi tiga macam: yaitu kemiskinan structural, kemiskinan cultural dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan structural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena struktur ekonomi, struktur social, dan struktur politik yang tidak kondusif bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kemiskinan cultural merupakan kemiskinan factor budaya, seperti kemalasan, cara berfikir fatalistic, dan rendahnya etos kewirausahawan. Sementara itu kemiskinan alamiah (natural) terjadi karena kondisi sumberdaya alam yang serba terbatas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kegiatan produksi.

Suarta (2013) Kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih banyak disebabkan oleh heterogenitas personal dan budaya yang dimiliki oleh keluarga miskin sedangkan faktor eksternal lebih banyak disebabkan faktor lingkungan dan struktur sosial kemasyarakatan. Persoalan kemsikinan tidak hanya menjadi persoalan keluarga miskin semata tetapi juga menjadi persoalan yang pelik bagi pemerintah.

Selanjutnya Suryati (2005) mengemukakan bahwa kemiskinan cultural mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh factor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak luar. Selanjutnya Arsyad (2007) menyatakan bahwa karakteristik social-ekonomi nelayan: dapat dilihat dari kapasitas jenis usaha, orientasi ekonomi, tingkat teknologi (alat tangkap dan armada) dan hubungan produksi menggolongkan nelayan menjadi 4 kategori seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Empat Kategori Penggolongan Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap dan Armada

Jenis usaha	Orientasi Ekonomi dan Pasar	Tingkat Teknologi	Hubungan Produksi
Usaha tradisional	Sub-sisten, rumah tangga	Rendah	Tidak hirarkis, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen
Usaha Post Tradisional	Sub-sisten, surplus, RT, pasar domestik	Rendah	Tidak hirarkis, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen
Usaha komersial	Surplus, pasar domestic, ekspor	Menengah	Hirarkis, status terdiri dari pemilik, manajer, dan ABK yang heterogen
Usaha industri	Surplus, ekspor	Tinggi	Hirarkis, status terdiri dari pemilik, manajer dan ABK yang heterogen

Natalia, M dan Alie, M.M. 2014. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur dan kepemilikan modal dan teknologi mempengaruhi terjadinya kemiskinan di kawasan Tambak Lorok, sehingga bentuk kemiskinan yang terjadi di kawasan Tambak Lorok dikategorikan sebagai bentuk kemiskinan natural.

Selanjutnya Suharto, (2002), dan (2005) mengemukakan bahwa kondisi lain yang memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah kebiasaan dan pola hidup. Nelayan sebenarnya adalah orang yang pekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk

membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk pada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi.

Hasil penelitian Oladimeji, Y.U et al (2014) Nelayan harus dididik untuk memahami diversifikasi pekerjaan, mengadopsi teknologi yang mampu meningkatkan kehidupan rumah tangga pedesaan, dan mempertahankan sumber daya perikanan dalam tingkat yang dapat diterima dari penipisan sumber daya global dan pencemaran lingkungan.

Hasil penelitian terhadap nelayan di Kota Padang Zein (1998) mengemukakan bahwa peningkatan teknologi dalam penangkapan ikan umumnya mempunyai pengaruh positip terhadap pendapatan nelayan skala kecil. Peningkatan pendapatan terhadap pemilik kapal sebesar 109%, dan pada buruh nelayan sebesar 27%. Semakin tinggi kekuatan mesin kapal, maka peluang untuk meningkatkan pendapatan juga semakin tinggi. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan nelayan perlu dilakukan alih teknologi kearah yang lebih maju dengan peralatan yang lebih modern, sehingga hasil tangkapan nelayan menjadi meningkat dan pendapatan juga bisa ditingkatkan. Pendapat lain juga mengemukakan Elfindri (2002) menyatakan bahwa pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dengan memberdayakan nelayan tradisional melalui pemberian bantuan peralatan melaut belum mampu meningkatkan perekonomian nelayan, karena permasalahannya adalah peningkatan produksi bagi nelayan tradisional tidak menjamin peningkatan pendapatan, karena jumlah produksi yang besar juga menurunkan harga jual ikan.

Sulitnya nelayan dalam mendapat hasil tangkapan yang baik akibat musim ikan yang tidak menentu, selain itu adanya pencemaran lingkungan daerah tangkap nelayan yang merusak ekosistem laut membuat hasil tangkapan nelayan semakin minim. Selain itu kenaikan BBM yang menyebabkan kebutuhan pokok ikut naik membuat kehidupan rumah tangga nelayan semakin sulit. (Hariansyah, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan Nikijuluw (2006), Elfindri (2002) mengemukakan bahwa berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat kecil di wilayah pesisir. Setidaknya ada 8 (delapan) yang telah dilaksanakan, yaitu: (a) motorisasi armada nelayan kecil; (b) penerapan sistim rantai dingin (*cold chain system*); (c) pembangunan prasarana perikanan; (d) program peningkatan eksport perikanan (Protekan 2003); (e) konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perikanan; (f) pengembangan koperasi perikanan; (g) pembentukan kelompok usaha bersama (KUB); dan (h) pengembangan kemitraan usaha.

Studi kami menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program belum mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh nelayan dan belum mampu memberantas kemiskinan nelayan. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada nelayan yang sering tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan. (Hasanuddin *et al* ,2013).

Ustman (2007) menggolongkan karakteristik masyarakat nelayan dari sudut pandang kepemilikan asset berupa factor produksi (1) nelayan yang tidak memiliki factor produksi kelotok atau pukat beserta segala perlengkapnnya, digolongkan sebagai nelayan buruh (2) nelayan yang memiliki alat produksi kelotok atau pukat beserta perlengkapannya yang disebut juragan.

Sejumlah kekurangan hak lainnya juga membatasi peluang nelayan skala kecil dan meningkatkan kerentanan mereka. Mengingat fakta bahwa sekitar 54% dari masyarakat pesisir secara fungsional tidak memiliki lahan dan lebih dari 30% yang benar-benar tidak memiliki lahan (Islam 2006), sebagian besar keluarga nelayan pesisir juga memiliki lahan.

Menurut Sunoto (2012) tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah: (1) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi berorientasi pasar, (2) Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan melalui modernisasi sistem produksi dan manajemen, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Prastyo, A.G . 2010 hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Oleh karenanya perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Nazmar (2013) mengemukakan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, kenyataannya bahwa program pembangunan perikanan dengan menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dengan program industrialisasi perikanan tangkap tidak selalu memberikan dampak positip terhadap pertumbuhan ekonomi nelayan skala kecil. Program industrialisasi perikanan tangkap pada umumnya hanya dinikmati oleh perusahaan perikanan tangkap skala besar saja, sedangkan nelayan skala kecil sedikit sekali dapat menikmati program tersebut, walaupun prioritas perhatian pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan diarahkan kepada kelompok nelayan skala kecil, namun

masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Ssesuai dengan perjalanan waktu, di satu pihak pertumbuhan ekonomi nelayan skala besar semakin nyata sedangkan pertumbuhan ekonomi nelayan skala kecil tetap saja tertinggal dan belum mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan yang dialami. Kondisi seperti ini menyebabkan terjadinya jurang pemisah status social yang semakin melebar antara kelompok pengusaha perikanan skala besar dan kelompok nelayan skala kecil.

Dengan demikian, nelayan skala kecil tidak hanya miskin; mereka juga sangat rentan. Komunitas mereka sering terisolasi, biasanya terletak di dekat tempat kerja mereka di pantai atau Khas terdekat tanah (milik pemerintah). Hal ini membuat mereka cenderung untuk bencana alam. Ketika bencana menyerang, keluarga harus membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian mereka dari awal. Keuangan terbatas membuat sulit untuk mengembalikan rumah dan infrastruktur. Hilangnya alat tangkap, perahu, ternak dan aset rumah tangga lainnya dapat menghapus mata pencaharian. (Ahmed and Neelormi 2008)

Sebagai makhluk social, rumah tangga nelayan skala kecil juga mempunyai keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya, mereka terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang terus mendesak, kadang kala anggota keluarga juga ikut berperan dalam menopang ekonomi keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan Zein (1998) menyatakan bahwa secara umum dalam masyarakat nelayan dikawasan pesisir, wanita memegang peranan yang amat penting untuk ikut serta menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya disamping mempunyai tanggung jawab urusan rumah tangga, mereka juga harus ikut membantu dan terlibat aktif mencari nafkah untuk menopang pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Dilain pihak Saidan (1998) juga mengemukakan bahwa peranan wanita nelayan cukup besar terhadap tambahan pendapatan rumah tangga nelayan di Kota Padang dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wanita nelayan bervariasi tergantung dari kesempatan peluang usaha yang ada.

Hasil Kajian Junaidi (2012) Tentang Industri Pengolahan Hasil Laut Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa sarana untuk mendukung industry pengolahan hasil laut belum tersedia secara optimal. Sarana yang lengkap untuk mendukung industry pengolahan hasil laut ditemukan di Kabupaten Agam, dan Kota Padang. Sementara di empat lokasi lainnya tidak ditemukan. Hasil pengolahan di enam lokasi ditemukan sama, seperti ikan asin, ikan teri asin, ikan teri tawar, ikan budu, rempeyek ikan dan udang. Namun terdapat juga perbedaan diantara lokasi tersebut seperti: empek-empek ikan di Kabupaten Agam, Tepung sala di Kabupaten Padang Pariaman, nugget ikan, abon tuna, bakso ikan, sup mata tuna di Kota Padang. Hasil pengolahan dilakukan oleh lembaga yang

telah dibentuk oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Pemasaran pengolahan hasil laut yang terbesar adalah untuk domestic dan luar daerah seperti: Riau dan Jambi. Harapan kedepan dari industry pengolahan hasil laut adalah terciptanya produk olahan yang sesuai dengan standard kesehatan untuk pasaran internasional, nasional, dan domestic. Tantangan kedepan adalah: belum tersedianya teknologi kemasan dan lebeling yang sesuai standard pasaran global.

Suherman dan Dault (2009) Mengemukakan bahwa peranan pelabuhan perikanan nusantara memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini disebabkan pelabuhan perikanan nusantara merupakan tempat interaksi antara berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat tinggal disekitar pelabuhan dengan masyarakat pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dll. Hal ini juga sebagai titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan ekonomi di darat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positip keberadaan pelabuhann perikanan nusantara adalah: terjadi peningkatan usaha dan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

Hasil Penelitian Silaen, Zein, dan Junaidi (2010) menunjukkan bahwa pelabuhan perikanan nusantara bungus belum berperan secara optimal. Hal ini terlihat bahwa banyak kapal-kapal nelayan tidak membongkar hasil tangkapannya di pelabuhan tersebut. Disamping kurangnya fasilitas pendukung seperti air bersih, dan bahan bakar untuk keperluan melaut. Alasan lain yang dikemukakan para nelayan adalah jauhnya jarak bongkar dengan tempat tinggal mereka, oleh karena itu para nelayan lebih menguntungkan membongkar hasil tangkapan di pelabuhan muara padang sekaligus dekat dengan tempat tinggal mereka.

Dukungan ekonomi para nelayan juga bersumber dari kontribusi ekonomi produktif para wanita nelayan oleh karena itu hasil kajian Akbarini, Gumilar, dan Garandiosa (2012) menunjukkan bahwa pengambilan keputusan rumah tangga dilakukan secara demokratis dengan dominasi oleh istri nelayan. Hal ini disebabkan bahwa kontribusi isteri nelayan cukup besar dalam keluarga nelayan yaitu: sebesar 31.32%, dengan curahan waktu kerja selama 9 jam.

Lebih jauh Elfindri (2007) Menyigi tentang implementasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa pada tataran konsep hamper semua program yang dilakukan pemerintah memiliki konsep yang baik untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Tapi ketika program itu dilaksanakan justru banyak terjadi pemelencengan program. Pemelencengan program merupakan pengaruh dari system korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi

dalam masyarakat sehingga sering bias pada kelompok non miskin. Hasil kajian ditemukan bahwa tiga program tersebut belum optimal memberikan akses yang luas bagi masyarakat miskin terhadap program, dua program sudah efektif yaitu: program raskin, dan program jaminan kesehatan. Sementara program bantuan pendidikan masih belum efektif mencapai target group program.

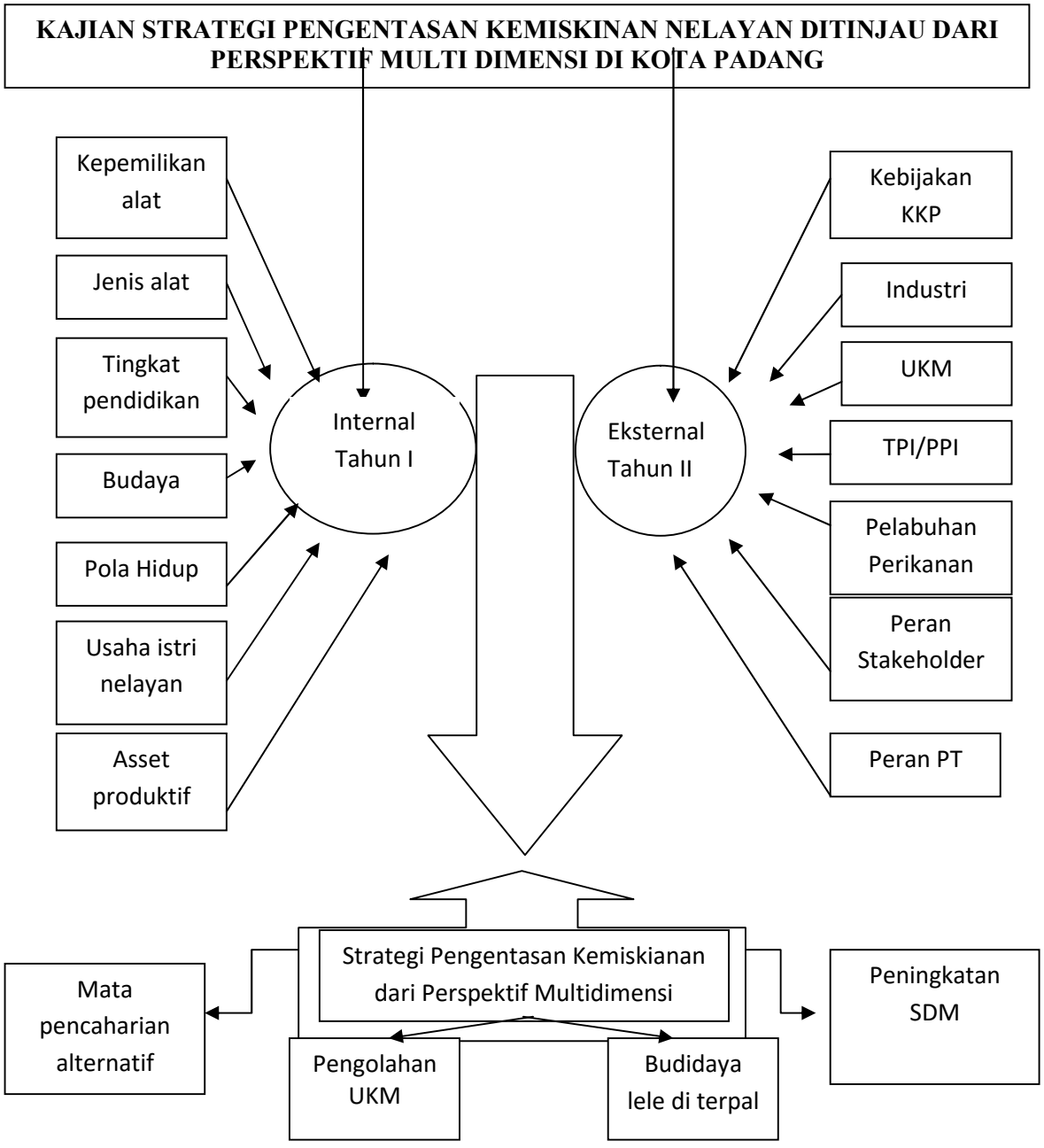
Selanjutnya Pritchet et al (2000), World Bank (2003), Elfindri dan Saputra (2005), Saputra, (2007) mengemukakan bahwa pembangunan di Indonesia sebenarnya belum memberikan sebuah pondasi yang kuat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Ini akibat lemahnya system ekonomi Indonesia sehingga ketika terjadi sedikit saja gejolak ekonomi seperti saat krisis tahun 1997 mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan.

Lebih lanjut De Jainvry and Sadoulet (2000), dan Ellis (2000) mengemukakan bahwa kemiskinan masyarakat disebabkan karena kekurangan asset, namun menurut Ellis (2000), masyarakat yang memiliki asset selalu dikaitkan dengan kesejahteraan. Oleh karena itu orang miskin dengan jangkauan aktivitas dan asset yang dimiliki berbeda dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Oleh karena itu banyak program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan efektif. Hal ini dikemukakan oleh laporan Bank Dunia (2003) menyatakan bahwa masih ditemukan banyak masalah dalam hal penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh: 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, 2) Banyaknya praktek korupsi di Indonesia, 3) Proyek berkelanjutan sulit dihasilkan hal ini disebabkan program pengentasan kemiskinan dibiayai oleh pemerintah dan lembaga donor menggunakan proyek-proyek basis, 4) Program menjadi lemah karena tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan masih terbatasnya data base kemiskinan, 5) Terbatasnya kemampuan pemerintah baik pusat dan daerah dalam mengimplementasikan setiap program.

Lemahnya sumberdaya manusia di wilayah pesisir terutama nelayan skala kecil menyebabkan perekonomian mereka sulit untuk berkembang, sehingga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir identik dengan masyarakat miskin, kondisi seperti ini merupakan tangtangan bagi program pembangunan pedesaan di wilayah pesisir. Kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan merupakan kemiskinan structural, pendapatan sebagai nelayan tidak dapat dipastikan, karena sangat tergantung kepada teknologi dan juga kondisi cuaca yang sangat mempengaruhi operasional penangkapan ikan. Disamping itu peluang pengembangan usaha ekonomi di luar sector perikanan sulit untuk dilakukan

karena terbatasnya pemilikan lahan untuk pengembangan usaha. Kondisi social ekonomi seperti ini menyebabkan masyarakat di wilayah pesisir pasarah dengan pendapatan yang mereka peroleh dan mereka tidak mempunyai masa depan yang jelas. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengkaji startegi pengentasan kemiskinan di tinjau dari perspektif multi dimensi di Kota Padang.

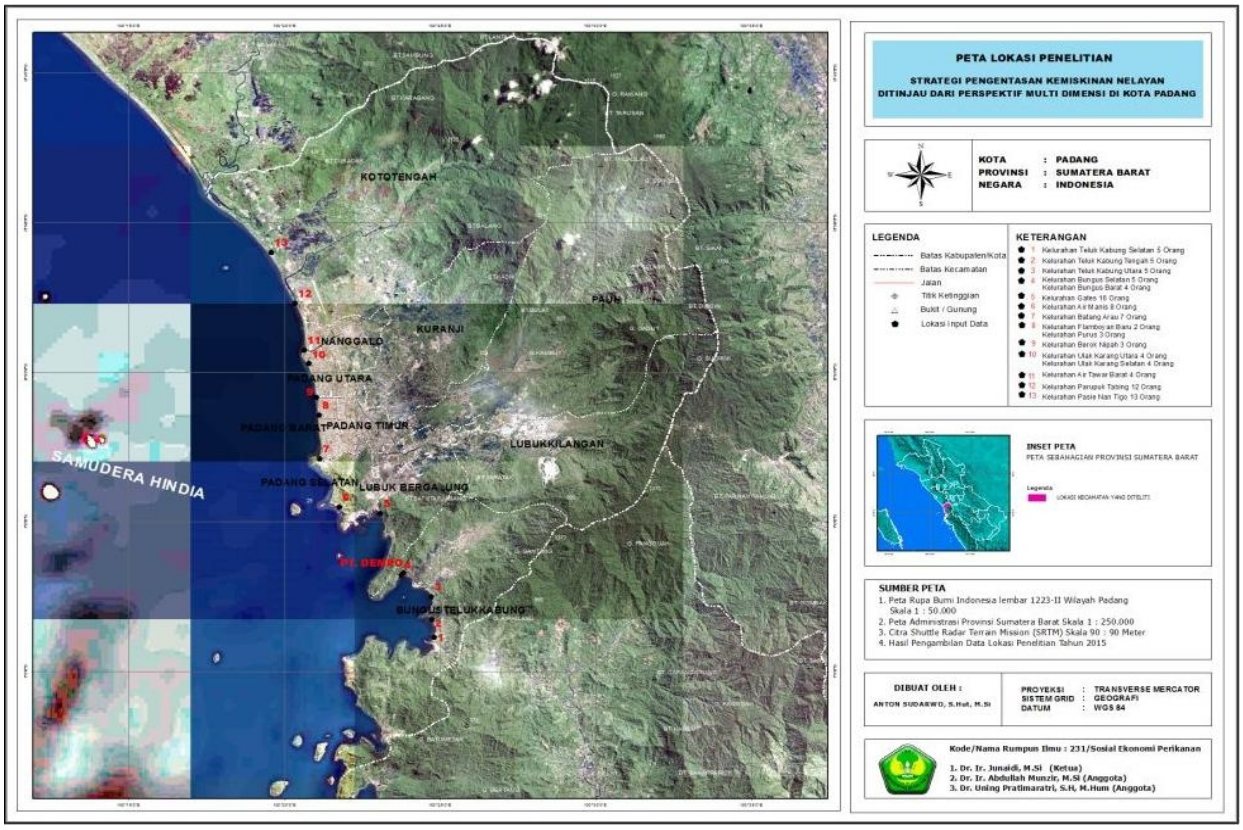


Gambar: 2.1 Peta Jalan Penelitian (Roadmap) Penelitian Hibah Bersaing

BAB III
PROFIL NELAYAN KOTA PADANG

3.1 Keadaan Umum Kota Padang

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berada antara 0° 44' 00" dan 1° 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100 ° 05' 05" dan 100° 34' 09" Bujur Timur. Luas wilayah kota Padang terdiri dari 694,96 km² daratan dan 720,00 km² perairan/laut yang merupakan hasil perluasan Kota Padang Tahun 1980, yaitu penambahan 3 kecamatan dan 15 kelurahan menjadi 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Dari seluruh Kecamatan tersebut sebanyak 6 kecamatan dan 22 Kelurahan berada di daerah pesisir. Kota Padang memiliki 19 pulau-pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan, dan memiliki 21 sungai besar dan kecil dimana 5 diantaranya merupakan sungai besar. Kota Padang dilintasi oleh 6 Daerah aliran sungai seperti: Das Timbalun, Das Bungus, Das Arau, Das Kuranji, Das Air Dingin, dan Das Kandis. Das Kandis merupakan Das terpanjang ± 20 Km. Seperti terlihat pada gambar 4.1 peta di bawah ini.



Gambar 3.1 Peta Kota Padang

Selain di daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 38,6 km2, Pulau Toran di kecamatan Padang Selatan seluas 25 km2 dan Pulau Pisang Gadang seluas 21,12 km2 juga di Kecamatan Padang Selatan. Padang juga memiliki pulau legendaris dengan nama pulau tersebut dihubungkan dengan peristiwa

masa lalu seperti: Pulau persumpahan, Pulau ular, pulau setan, pulau pisang ketek dengan legendarisnya kapal simalin Kundang.

Wilayah daratan Kota Padang yang ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 0-1853 M diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm perbulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan pada tahun 2003. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 230-320 C pada siang hari dan pada malam hari adalah antara 220-280 C. Kelembabannya berkisar antara 78-81 persen.

Topologi wilayah, Kota Padang yang dilewati sejumlah aliran sungai yaitu sebanyak 21 aliran sungai. Desa pesisir/tepi laut adalah desa/ kelurahan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau garis pulau) dengan sumber kehidupan rakyatnya sebagian besar tergantung pada laut.

Wilayah kota Padang memiliki 11 kecamatan , ada tujuh kecamatan yang berhadapan langsung dengan garis pantai diantaranya kecamatan bungus teluk kabung luas wilayah 100,78 Km^2 dengan presentase 14,50 %, Padang Barat luas wilayah 7,00 Km^2 dengan presentasi 1,01 %, Padang Utara luas area 8,08 Km^2 dengan presentasi 1,16 %, Padang Selatan luas wilayah 10,03 Km^2 dengan presentasi 1,44 %, Nanggalo luas wilayah 8,07 Km^2 dengan presentasi 1,16 %, Lubuk Begalung luas area 30,91 Km^2 dengan presentase4,45 % ,dan Kecamatan Koto Tangah luas wilayah 232,25 Km^2 dengan presentasi 33,42%. Kecamatan yang tidak memiliki pantai adalah Kecamtan Lubuk Kilangan luas area 85,99 Km^2 dengan presentase 12,37 %, pauh luas area 146,26 Km^2 dengan presentase 21,05 %, Padang Timur luas area 8,15 Km^2 dengan presentase 1,17 % dan Kecamatan Kuranji luas area 57,41 Km^2 dengan presentase 8,26 %.

Batas Kota Padang sebelah barat berhadapan dengan samudera hindia, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten pesisir selatan tepatnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Timur Berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok.

3.1.1 Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Padang yang dilalui oleh 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai-sungai kecil , danau dan rawa, maka wilayah Kota Padang jika dimusim hujan cukup banyak wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir/genangan. Hal ini disebabkan terdapat 21 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 133,9 Km (5 sungai besar dan 16 sungai kecil). Umumnya sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketingginnya tidak jauh berbeda dengan ketinggian permukaan laut.

3.1.2 Klimatologi

Suhu udara Kota Padang sepanjang tahun 2013 berkisar antara 22,0ºC sampai 31,7ºC dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 80% - 85% dengan curah hujan rata-rata 347,5 mm/bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari . Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (615 mm) dan terendah pada bulan Maret (81 mm). Angin didominasi oleh angin Barat, Barat Daya, Barat Laut dengan kecepatan rata-rata 5-6 knot, dan kecepatan tertinggi mencapai 9 – 35 knot. Dipengaruhi oleh angin musim maka arus permukaan di wilayah perairan Kota Padang sepanjang tahun mengalir ke arah Tenggara hingga Barat Daya (musim Barat) dengan kekuatan arus antara 1 – 45 cm/detik biasanya mencapai puncak pada bulan Desember.

Arus musim Timur terjadi antara bulan April hingga Oktober, melemah dengan kekuatan antara 1 cm/detik hingga 36 m/detik. Pada bulan Juli arus mencapai kekuatan minimum antara 1 cm/detik hingga 5 cm/detik. Selain itu di perairan Kota Padang juga terjadi arus pantai yang diakibatkan oleh gelombang. Arus ini berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai. Tinggi gelombang yang terjadi berkisar antara 0,5 – 2,0 meter.

3.1.3 Jumlah Penduduk Kota Padang

Berdasarkan hasil SP 2010, diperkirakan jumlah penduduk Kota Padang diharapkan menggunakan laju pertumbuhan 1,57 % per tahun, sehingga laju pertumbuhan 2,23 % tidak relevan lagi. Berdasarkan itu pula jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2011 akan menjadi sebanyak 844.316 orang dan tahun 2012 sebanyak 854.336 orang, dan pada tahun 2013 diperkirakan naik menjadi 876.678 orang. Seperti terlihat pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Pada Tahun 2010-2013 (orang)

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	Kepadatan Penduduk Tahun 2013
1. Bungus Teluk Kabung	22.896	23.142	23.360	23.858	237
2. Lubuk Kilangan	48.850	49.751	50.249	51.847	603
3. Lubuk Begalung	106.432	108.018	109.584	113.217	3.663
4. Padang Selatan	57.718	57.386	58.320	58.780	5.860
5. Padang Timur	77.868	77.932	77.989	78.789	9.667
6. Padang Barat	45.380	46.060	46.411	45.781	6.540
7. Padang Utara	69.119	69.275	69.729	70.051	8.670
8. Nanggalo	57.275	57.731	58.232	59.137	7.328
9. Kuranji	126.729	128.835	130.916	135.787	2.365
10. Pauh	59.216	60.553	61.755	64.864	443
11. Koto Tangah	162.079	165.633	167.791	174.567	752
Jumlah	833.562	844.316	854.336	876.678	1.261

Sumber : BPS, Padang Dalam Angka 2013

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah kecamatan Teluk Kabung dengan tingkat kepadatan juga paling rendah yakni 237jiwa/km^2 pada tahun 2013, hal ini disebabkan kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sedangkan kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Padang Timur dengan tingkat kepadatan 9.667 jiwa/km^2 , yang diikuti oleh kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo dengan kepadatan penduduk masing-masingnya adalah 8.670 jiwa/km^2 dan 7.328 jiwa/km^2. Sedangkan untuk jumlah penduduk paling besar berada di kecamatan Koto Tangah yang merupakan kecamatan terluas di kota Padang. Data ini memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk kota Padang tidak merata dan masih cenderung terkonsentrasi di pusat kota, hal ini merupakan fenomena kota pada umumnya.

3.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis dan Kelompok Umur

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2013 komposisi penduduk Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki relative lebih sedikit dari pada perempuan dengan sex ratio 99,46. Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pola piramida tidak

normal, dimana penduduk berusia muda relatif besar, yaitu 26,36 % dari jumlah penduduk (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun) sedangkan secara piramida normal bergerak sesudah tingkat umur 24 tahun.

Sebagian besar komposisi penduduk penduduk produktif tahun 2013 tersebar pada kelompok umur usia muda, 15 – 34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh faktor alamiah yaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan masih besarnya porsi jumlah penduduk 0-4 tahun, sedangkan faktor non-alamiah adalah factor eksternal, yaitu tingginya angka migrasi dan urbanisasi ke kota Padang. Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya pada kelompok umur 19-29 dan 20–24 tahun, sedangkan titik *threshold* terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian pada usia 25-29 tahun secara perlahan mulai turun, mulai usia kerja usia 30 sampai 75 tahun ke atas.

Gambaran data kependudukan pada Tabel 4.2 terlihat bahwa, jumlah penduduk produktif, (15-64 tahun) tahun 2013 tercatat 613.294 orang, yaitu sekitar 69,96 %. Sedangkan penduduk non produktif sebanyak 231.129 orang (0-14 tahun) dan 65 tahun keatas sebanyak 32.255 orang atau sekitar 30,04 %. Sebagian besar komposisi penduduk penduduk produktif tahun 2013 tersebar pada kelompok umur usia muda, 15 – 34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh faktor alamiah yaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan besarnya porsi jumlah penduduk 0-4 tahun, sedangkan faktor non-alamiah adalah factor eksternal, yaitu tingginya angka migrasi dan urbanisasi ke kota' Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya pada kelompok umur 19-29 dan 20–24 tahun, sedangkan titik *threshold* terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian pada usia 25-29 tahun secara perlahan mulai turun, mulai usia kerja usia 30 sampai 75 tahun ke atas.

Tabel 3.2
Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut
Kelompok Umur Tahun 2013

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			J U M L A H	
	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	%	Ratio
0 – 4	41.608	40.123	81731	9,32	103,70
5 – 9	38.818	37.031	75849	8,65	104,83
10 – 14	37.319	36.230	73549	8,39	103,01
15 – 19	45.757	47.371	93128	10,62	96,59
20 – 24	58.033	57.564	115597	13,19	100,81
25 – 29	39.023	36.541	75564	8,62	106,79
30 – 34	31.362	32.086	63448	7,24	97,74
35 – 39	30.267	30.960	61227	6,98	97,76
40 – 44	28.009	29.080	57089	6,51	96,32
45 – 49	24.328	25.014	49342	5,63	97,26
50 – 54	21.379	21.580	42959	4,90	99,07
55 – 59	17.247	17.106	34353	3,92	100,82
60 – 64	10.209	10.378	20587	2,35	98,37
65 – 69	6.183	6.848	13031	1,49	90,29
70 – 74	3.984	5.089	9073	1,03	78,29
75+	3.636	6.515	10151	1,16	55,81
JUMLAH	**437.162**	**439.516**	**876.678**	**100**	**99,46**

Sumber : BPS, Padang Dalam Angka 2013

3.1.5 Sumbangan antar sektor Terhadap perekonomian Kota Padang

Dari Tabel 3.3 dibawah ini terlihat bahwa kontribusi yang terbesar menyumbang terhadap perekonomian Kota Padang adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata sebesar 24,35%, penyumbang terbesar kedua adalah perdagangan, hotel, dan restoran dengan rata-rata 21, 41%, sumbangan sektor ini berkaitan dengan kharakteristik orang minangkabau sebagai pedagang, sementara hotel juga memberikan andil yang besar terhadap PDRB Kota Padang disebabkan sebagai daerah wisata, sementara restoran memegang peranan penting dalam hal wisata kuliner. Penyumbang sektor ekonomi ketiga adalah sektor jasa-jasa sebesar 16,81%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 14,84%, sumbangan sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan menyumbang sebesar 8,49%.

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha 2009 – 2013 (dalam %)

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013	Rata2
1.	Pertanian peternakan kehutanan Perikanan	5,73	5,82	5,87	5,78	5,70	5.67
2.	Pertambangan dan penggalian	1,74	1,69	1,66	1,68	1,66	1.66
3.	Industri pengolahan.	14,97	14,89	14,66	14,29	13,81	14.84
4.	Listrik.gas.air bersih	2,09	2,00	1,92	1,88	1,81	1.92
5.	Bangunan	4,45	4,88	5,10	5,23	5,25	5.02
6.	Perdagangan hotel dan restoran	20,85	21,15	21,37	21,50	21,60	21.41
7.	Pengangkutan dan komunikasi	24,31	24,18	24,18	24,34	24,83	24.35
8.	Keuangan persewaan jasa perusahaan	8,76	8,62	8,51	8,66	8,47	8.49
9.	Jasa-Jasa	16,99	16,77	16,74	16,63	16,88	16.81

Sumber: *Bappeda Kota Padang Dalam Angka 2013*
Catatan: * = *angka sementara*

Dari Tabel 3.3 juga dapat dilihat bahwa sumbangan sektor pertanian dalam hal ini termasuk didalamnya peternakan, kehutanan, dan perikanan tidak beranjak selama lima tahun hanya berkisar rata-rata 5,67 %. Gambaran ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan di sektor ini dari waktu ke waktu. Diharapkan sektor perikanan sebenarnya mampu menunjang perekonomian di Kota Padang kedepan, hal ini juga menggambarkan bahwa sektor pertanian dari waktu ke waktu telah mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan telah banyaknya terjadi peralihan fungsi lahan menjadi sektor perumahan dan perdagangan. Sektor bangunan berada dibawah sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 5,02%. Penyumbang terendah terhadap PDRB Kota Padang adalah pertambangan dan galian hanya menyumbang sebesar 1,66%.

3.2 Sektor Perikanan Kota Padang

Sektor perikanan di Kota Padang dapat dilihat dari aktifitas nelayan yang ada di wilayah pesisir pantai. Aktivitas ini dapat dilihat dari jumlah nelayan dan jenis alat tangkap yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Untuk lebih jelasnya jumlah nelayan dan jenis alat tangkap yang ada di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan 3.5 di bawah ini.

Table 3.4. Jumlah Nelayan di Setiap Kecamatan di Kota Padang

Kecamatan /Sub District	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Bungus Teluk Kabung	1.588	121	1.709
2.Lubuk Kilangan	-	-	-
3.Lubuk Begalung	979	110	1.089
4.Padang Selatan	889	91	980
5.Padang Timur	-	-	-
6.Padang Barat	399	21	420
7.Padang Utara	645	41	686
8. Nanggalo	28	6	34
9.Kuranji	-	-	-
10.Pauh	-	-	-
11. Koto Tangah	1.935	118	2.053
Total			6.971

Sumber: Kantor BPS Kota Padang 2013

Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang terbanyak di Kecamatan Koto Tangah dengan jumlah nelayan sebanyak 2.053 orang, diikuti oleh nelayan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan jumlah nelayan 1.709 orang. Jumlah nelayan di Lubuk Begalung merupakan jumlah terbanyak ke tiga dengan jumlah nelayan 1.089 orang, di ikuti oleh nelayan masing-masing di Padang Selatan (980 orang), Padang Utara (686 orang), Padang Barat (420 orang), dan yang paling rendah di Kecamatan Nanggalo 34 orang. Rendahnya nelayan di Kecamatan Nanggalo ini disebabkan letaknya bukan di wilayah pesisir Kota Padang, namun nelayan yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan tersebut. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa jenis alat tangkap yang digunakan di kota Padang masih tergolong alat tangkap tradisional. Pada umumnya mereka menggunakan perahu motor tempel dalam kegiatan menangkapan ikan. Umumnya alat tangkap yang digunakan dengan perahu motor tempel (1283 unit) ini adalah jaring. Kapal motor (374 unit) digunakan untuk alat tangkap bagan, pukat payang.

Dari jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan di Kota Padang diperoleh hasil tangkapan nelayan dengan berbagai jenis hasil tangkapan seperti terlihat pada Tabel 3.6 berikut ini: Jenis ikan yang banyak tertangkap adalah jenis ikan cakalang, tuna, tongkol, hasil tangkapan ini didominasi oleh alat tangkap payang, jenis ikan tenggiri, kembung, layang ini di dominasi oleh hasil tangkapan jaring.

Tabel 3.5. Jumlah Alat Tangkap Ikan Menurut Jenis Tahun 2013

Jenis peralatan	Kecamatan						Jumlah
	Koto Tangah	Padang Utara	Padang Barat	Padang Selatan	Lubuk Begalung	Bungus TL KB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-KM	-	-	-	108	-	6	114
I.Pancing							
-MT	-	4	11	3	-	-	18
2.Rawai							
-KM	-	-	-	41	-	-	41
-MT	-	4	-	-	-	-	4
3.Ranggung							
-KM	-	-	-	43	-	5	48
II.Pukat/seine							
1.Payang (MT)	35	33	1	22	-	11	102
2.Pukat (TM) Pukat tepi	3	3	3	-	-	5	14
3.Dogol (PTM)	-	1	-	-	-	2	3
4.Lampara							
-KM (osoh)	16	-	-	-	-	-	16
-TM (uwik)	7	-	-	-	-	-	7
-PTM (uwik)	7	-	-	-	-	-	2
5.Purse seine	2	-	-	-	-	2	2
Sub jumlah / sub total	63	45	45	217	0	100	470
III.Perikanan lampu/light fishing							
1.Bagan							
-KM	52	-	-	-	49	20	121
-MT	6	-	-	-	4	12	22
-PTM	-	32	5	8	13	25	83
2.Colok							
Jenis peralatan	Kecamatan/ subdistrict						Jumlah
	Koto Tangah	Padang Utara	Padang Barat	Padang Selatan	Lubuk Begalung	Bungus TL KB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-MT	-	-	-	-	-	-	-
-PTM	-	-	1	-	4	-	5
IV.Jaring/ Netting							
1.Gill Net							
-MT	188	148	122	86	98	164	806
-PTM	-	-	-	2	-	-	2
2.Tramel Net							
-MT	50	20	46	26	3	15	160
-PTM	-	-	-	-	-	-	-

Sumber :data BPS Kota Padang 2013

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa jenis alat tangkap yang digunakan di kota Padang masih tergolong alat tangkap tradisional. Pada umumnya mereka menggunakan perahu motor tempel dalam kegiatan menangkapan ikan. Umumnya alat tangkap yang digunakan dengan perahu motor tempel (1283 unit) ini adalah jaring. Kapal motor (374 unit) digunakan untuk alat tangkap bagan, pukat payang. Hasil tangkapan selar, dan teri di dominasi oleh hasil tangkapan bagan. Ikan kuwe dan ikan karang di dominasi oleh hasil tangkapan pancing. Ikan layur, Udang, peperek, di dominasi oleh alat tangkap pukat tepi, disamping itu hasil tangkapan udang yang berukuran besar di dinasi oleh alat tangkap jaring udang.

Tabel 3.6. Jumlah Produksi Ikan Laut Menurut Jenis Tahun 2013

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)
1	Tuna (*Thunnus sp*)	4.257,30
2	Cakalang *(*Catsuwonus pelamis*)*	5.861,90
3	Tongkol *(Auxis thazard)*	3.493,50
4	Tenggiri *(Scomberomorus commersom)*	795,70
5	Ikan Karang *(Calcalifer sp)*	758,60
6	Kembung *(Rastrelliger kanagurta)*	515,80
7	Layang (*Detapterus pusailus)*	1.632,40
8	Selar *(Upeneus sulphureus)*	452,80
9	Teri *(Solephorus sp)*	381,60
10	Tembang *(Sardinella fimbriata)*	436,50
11	Layur *(Trichiurus sp)*	38,70
12	Udang *(Fanaeus sp)*	34,30
13	Peperek *(Leiognathus spp)*	225,80
14	Kuwe *(Caranx sexfasciatus)*	88,10
15	Lainnya	1.095,10
	Total	20.068,10

Pada umumnya hasil tangkapan ikan-ikan nelayan tersebut di daratkan langsung di lokasi masing-masing nelayan berada. Untuk nelayan lubuk begalung tepatnya di gaung Teluk Kabung nelayan mendaratkan ikannya di TPI Gaung. Hal yang sama juga bagi nelayan di Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Utara, dan Kecamatan Koto Tangah di Pasir Sebelah.

Permukiman nelayan umumnya terbangun secara spontan dan sering kali dinilai secara umum sebagai permukiman masyarakat miskin. Berbagai berita di media massa cenderung menempatkan nelayan sebagai kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Yang dikatakan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nakhoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan). Berikut gambaran perumahan nelayan di Kota Padang.







Gambar 3.2 Pemukiman Nelayan Kota Padang

Menyebut nelayan khususnya nelayan tradisional, orang akan selalu menghubungkannya dengan kehidupan yang serba susah, hidup dengan ekonomi yang rendah, atau istilah lainnya "Hidup segan mati tak mau". Demikianlah gambaran yang diberikan oleh orang untuk menggambarkan betapa miskinnya kehidupan nelayan tradisional. Dan secara realitas, memang kondisi kehidupan nelayan khususnya nelayan tradisional memang miskin. Gambaran ini nampaknya sangat kontradiksi dengan potensi pesisir dan laut Indonesia yang begitu besar, laut Indonesia termasuk yang paling luas di dunia. Dengan keluasan, yang sudah termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diperkirakan kurang lebih 5,8 juta kilometer dengan panjang garis pantai seluruhnya 80,790 kilometer atau 14 % panjang garis pantai di dunia. Namun anehnya nelayan tradisional tetap miskin. Bahkan bisa di katakan nelayan adalah kelompok masyarakat yang paling miskin dari pada petani atau pengrajin (Mubyarto dkk, 1984: 16).

Indonesia yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi nelayan (Haeruman, 1987:2). Jumlah tersebut bisa jadi lebih besar lagi, mengingat selama ini data statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah rejim orde baru lebih banyak manipulatif. Tetapi sebagai perbandingan sementara data statistik tersebut bisa di pakai. Definisi nelayan di atas tidak menunjukkan adanya strata sosial masyarakat nelayan. Tapi dalam peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat muncul istilah nelayan kecil, ini mengisyaratkan bahwa ada nelayan kecil dan ada nelayan yang tidak kecil atau kaya dalam konteks pendapatannya. Dalam media massa akhir-akhir ini sering dikemukakan tentang pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing dengan menggunakan kapal. Informasi dalam media massa tersebut mengisyaratkan bahwa adanya perbedaan penguasaan teknologi dalam melaut atau menangkap ikan di kalangan nelayan. Penggunaan teknologi ini menunjukan bahwa kemampuan nelayan dalam

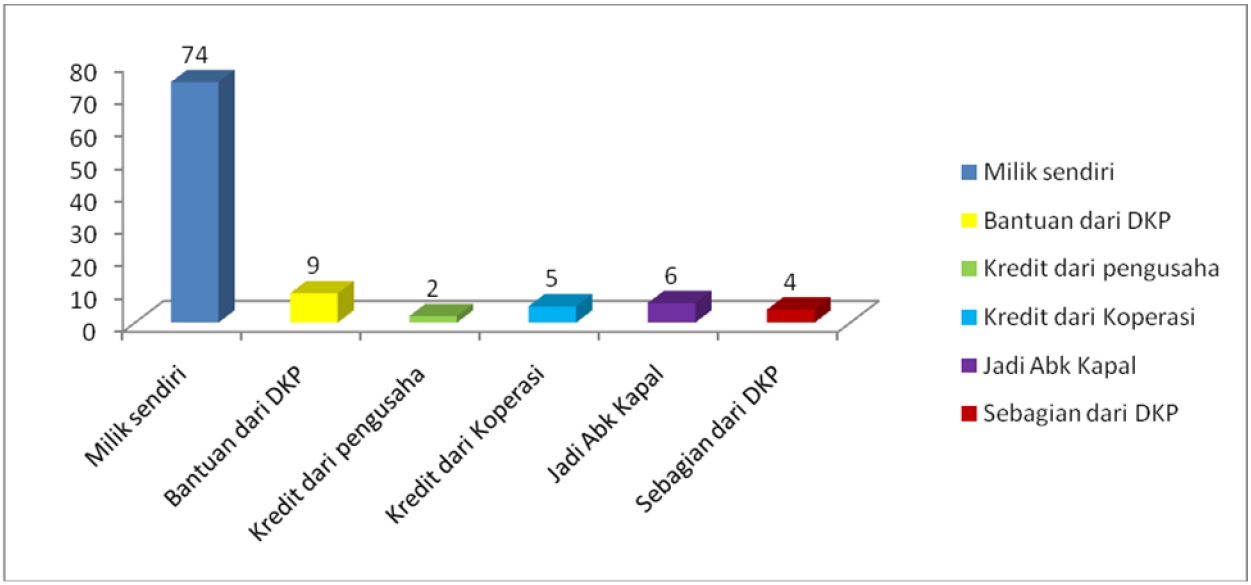
menggunakan sumber daya penangkapan ikan tidak sama. Artinya lebih lanjut pendapatan mereka dapat berbeda-beda pula.

3.3 Analisis Faktor Internal Kemiskinan Nelayan

3.3.1 Kepemilikan Alat

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian, maka dilakukan tabulasi data, dan disajikan dalam bentuk grafik atau gambar. Selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan realita yang ada di lapangan tentang kemiskinan nelayan secara internal di Kota Padang. Hasil data-data tersebut disajikan seperti digambarkan pada gambar berikut:

Berdasarkan bardiagram kepemilikan alat tangkap gambar 3.3 menunjukkan bahwa dari 100 orang nelayan yang di ambil datanya diperoleh sebanyak 6 kriteria kepemilikan. Kriteria pertama menunjukkan bahwa 74 orang merupakan milik sendiri, 9 orang status kepemilikan alat tangkap bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 2 orang nelayan dengan status kepemilikan latnya diperoleh dari kredit dari pengusaha, 5 orang dari kredit koperasi, 6 orang memperoleh kepemilikan alat tangkap berasal dari bekerja sebagai anak kapal, setelah uang terkumpul mereka membelikan untuk alata tangkap sendiri. Kriteria yang terakhir adalah status kepemilikan alat berasal dari sebagian bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan serta sebagian dari usaha sendiri 4 orang.



Gambar 3.3. Bardiagram kepemilikan alat tangkap di Kota Padang

Berdasarkan hasil diskusi dengan para penyuluh lapangan bidang perikanan yang merupakan perpanjangan tangan para nelayan yang selalu membina dan mendampingi mereka dalam setiap aktivitas dilapangan. Para penerima bantuan selalu saling tuding karena mereka tidak memiliki komitmen untuk membina kelompok agar usaha bersama yang telah terbentuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu kelompok yang dibentuk tidak bertahan lama dan kadangkala dapat bubar tanpa ada pertanggung jawaban. Hal inilah yang membuat para penyuluh kesal dan susah melakukan pembinaan kelompok. Pada hal jika para nelayan memiliki komitmen yang kuat mereka dapat mengakumulasikan bantuan itu menjadi lebih besar dan dapat disalurkan ke nelayan lain yang memerlukan alat tangkap tersebut. Faktor lain adalah adanya hubungan yang saling terkait antara satu sama lain, dan hal inilah yang sulit menegakkan komitmen tersebut. Sebagai contoh: yang masuk dalam kelompok tersebut adalah: hubungan anak, kemenakan, menantu, ipar, dan hubungan sekampung, sesuku, dan mamak (om). Sekalipun dalam penerimaan bantuan tersebut telah dijelaskan sanksi dan efek jika mereka tidak komitmen dengan perjanjian tersebut, namun mereka seakan tidak perduli dengan hal tersebut. Namun di kelompok nelayan lain jika mereka komitmen saat ini telah terakumulasi dana untuk kelompok mereka cukup besar, seperti kelompok nelayan : kub laut biru reformasi. Dari gambaran ini jelas terlihat bahwa semua bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan memiliki manfaat yang besar terhadap kehidupan mereka. Berdasarkan hasil penelitian Dikrurahman dan Sofhani (2015) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kelompok Nelayan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Manfaat pengembangan kelompok telah mampu dirasakan oleh nelayan kelompok dan secara umum keadaannya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kondisi yang menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pengembangan kelompok nelayan telah mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hasil penelitian Marheni *et al* (2014) terhadap pengaruh bantuan langsung kepada masyarakat nelayan menunjukkan bahwa : (1) rata-rata jumlah Bantuan Langsung Masyarakat yang diterima oleh anggota kelompok nelayan sebesar Rp. 6.122.449,00; (2) rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh anggota kelompok nelayan sebesar Rp. 1.098.104,00 per bulan untuk tahun 2012; dan (3) Dana BLM berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih dan besar pengaruhnya sebesar 61,9%. Namun perbedaan dalam penelitian ini tidak terlihat bahwa bagaimana status kepemilikan asset nelayan tersebut. Oleh karena itu kedepan bantuan terus dijalankan agar nelayan pekerja dapat merubah status mereka menjadi nelayan pemilik. Namun bantuan harus dilakukan dengan tepat kepada sasaran, yaitu kepada nelayan yang memerlukannya.

3.3.2 Jenis Alat Tangkap Nelayan

Jenis alat tangkap nelayan tradisional di Kota Padang berdasarkan hasil yang dilakukan terhadap 100 orang nelayan menunjukkan bahwa alat tangkap pukat payang (41 unit) merupakan jenis alat tangkap yang banyak dioperasikan di Kota Padang. Alat tangkap ini dioperasikan dengan perahu yang disebut Jukung dengan panjang ± 10 meter dengan lebar 1,5 meter dengan dalam 1,25 meter. Rata-rata jumlah nelayan dalam satu kali operasi sebanyak 6 orang dengan jumlah produksi tidak dapat dipastikan, hal ini sangat ditentukan oleh musim ikan, cuaca, dan kondisi nelayan seperti terlihat pada Tabel 3.7 berikut.

Dari Tabel 3.7 di bawah terlihat bahwa trammel net memiliki rata-rata pendapatan yang paling rendah saat ini. Hal ini disebabkan sebahagian wilayah daerah penangkapan jaring udang, telah dicemari oleh sampah-sampah yang di bawa oleh sungai ke laut, sehingga semua lumpur dimana udang berkembang biak telah di tutupi oleh sampah-sampah tersebut. Dari semua jenis alat tangkap yang dioperasikan di Kota Padang payang dan pukat tepi termasuk alat tangkap yang kurang ramah lingkungan, hal ini disebabkan mata jaring di kantong jaring memiliki mata jaring yang kecil, sehingga sewaktu dioperasikan dapat menangkap semua jenis ikan dasar dan permukaan.

Tabel 3.7 . Jenis Alat Tangkap yang Digunakan Nelayan di Kota Padang

No	Jenis alat	Unit	Panjang (Meter)	lebar	Waktu operasi	Rata-rata pendapatan (Rp)/hari
1	Payang dan pukat tepi	41	100 - 200	7- 10 meter	pagi - sore	100 - 350
2	Gill net	34	150 - 200	3,5 - 8 meter	pagi - sore-malam	100 - 250
3	Pancing colok	9	20 - 100	0 meter	pagi - sore-malam	100 - 250
4	Pancing ulur	8	20 - 150	0 meter	pagi - sore - malam	100 - 250
5	Trammel net	8	100 - 200	3,5- 8 meter	pagi - malam	50 - 150

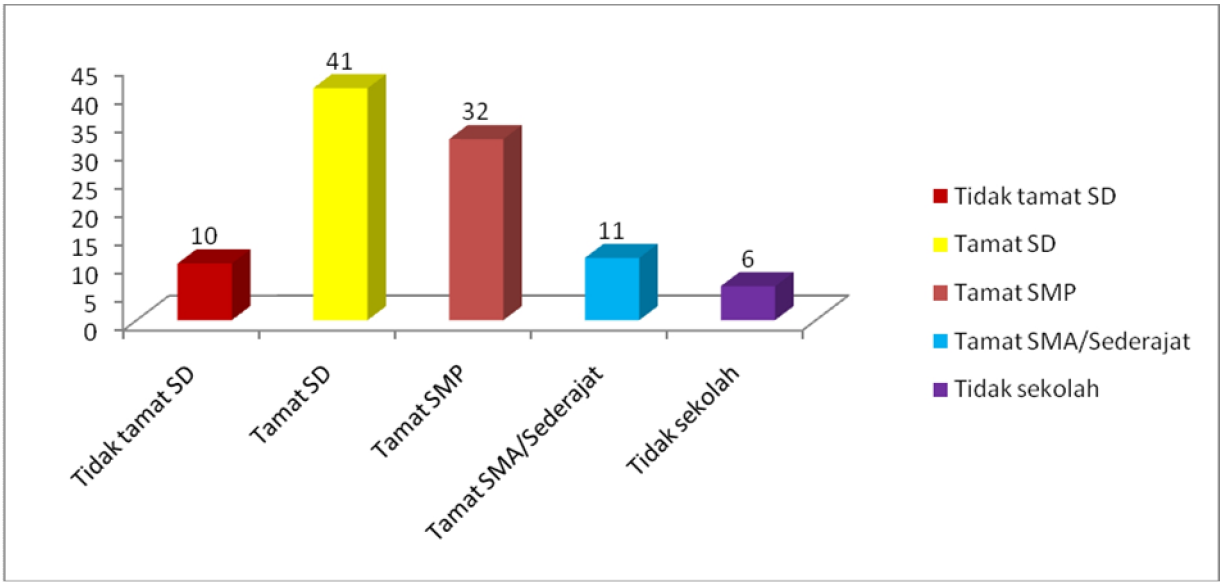
Sumber: Data hasil penelitian 2015

Berdasarkan hasil penelitian Adisasmita (2013) mengemukakan bahwa masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir yang mata pencahariannya sebagai nelayan dan kehidupannya sangat bergantung pada laut seperti: perikanan tangkap dengan berbagai macam alat tangkap yang memiliki resiko sangat tinggi dan fluktuasi dipengaruhi oleh alam. Selanjutnya hasil penelitian Ariyanti dan Santoso (2015) mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan perikanan tangkap disebabkan oleh penguasaan teknologi yang rendah, pemasaran melalui juragan, dan konsumsi nelayan cendrung membelanjakan pendapatannya pada saat itu juga. Dari hasil penelitian ini terdapat kesamaan hasil bahwa jenis alat tangkap yang di operasikan di Kota Padang memiliki teknologi yang rendah, dan pemasaran biasanya melalui agen, dan pendapatan mereka umunya dibelanjakan pada saat itu juga.

Oleh karena itu pola konsumsi mereka umunya digunakan untuk konsumsi dan tidak ada pemikiran untuk menabung pada saat tidak musim ikan.

3.3.3 Pendidikan nelayan di Kota Padang

Dari gambar 3.4 terlihat bahwa rata-rata pendidikan nelayan tamat SD (41%), hal ini menggambarkan bahwa sumberdaya manusia di masyarakat nelayan di Kota Padang umumnya berpendidikan rendah, ini juga mengisaratkan kepada kita bahwa regenerasi nelayan dilakukan oleh orangtua mereka karena ketidakmampuan membiayai persekolahan mereka, oleh karena itu mau tidak mau suka atau tidak pekerjaan yang tidak memerlukan pola pikir yang banyak adalah sebagai nelayan. Oleh karena itu perlu kebijakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan di kalangan masyarakat nelayan pembebesan uang sekolah, serta beasiswa untuk anak-anak mereka untuk masuk keperguruan tinggi. Masyarakat nelayan yang menamatkan pendidikan SMP sebanyak (32%), SMA hanya (11%), dan masih ditemui tidak tamat SD (10%), serta tidak sekolah (6%).



Gambar 3.4 Bardiagram pendidikan nelayan dikota padang

Berdasarkan hasil penelitian Agungggunanto (2011) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan nelayan tidak mempengaruhi pendapatan keluarga nelayan, yang mempengaruhi pendapatan keluaraga nelayan adalah : pengalaman, jumlah anggota keluarga yang bekerja, teknologi, dan perilaku nelayan. Kajian lainnya juga menunjukkan bahwa pendapatan, karakteristik rumah tangga, tingkat pendidikan dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan nelayan. Pendapatan dan karakteristik rumah tangga yang terdiri dari status kepemilikan rumah, jumlah anggota keluarga yang bekerja dan status kepemilikan alat produksi (armada tangkap) serta tingkat pendidikan dan modal kerja bersosiasi

positif dengan ketidakmiskinan, oleh karena itu perlu memberikan beasiswa yang mendukung pendidikan bagi anak mereka. (Fajriadi, et al , 2013). Hasil penelitian yang di lakukan terhadap nelayan di Kota Padang sejalan dengan hasil penelitian Agunggunanto bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, namun sebagaian hasil yang dikemukakan oleh Fajriadi memiliki beberapa kesamaan seperti kepemilikan alat, dan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Oktama (2013) mengemukakan bahwa semakin tinggi kondisi sosial keluarga nelayan semakin tinggi pendidikan dan semakin tinggi kondisi ekonomi keluarga nelayan semakin tinggi pendidikan anak mereka. Dari hasil penelitian nelayan di Kota Padang akibat rendahnya tingkat pendidikan ini para penyuluh sukar untuk membentuk mereka di dalam kelompok-kelompok usaha bersama. Kedepan agar suksesnya segala jenis bantuan dan program pemerintah diperlukan pendidikan moralitas agama oleh para ustad-ustad agar perilaku dalam kelompok masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih baik.

3.3.4 Budaya

Umumnya nelayan di kota Padang tradisional digolongkan menjadi nelayan tradisional, terutama berdasarkan jenis alat tangkap dan kemampuan alat tangkap dan jarak penangkapan ikan dari pantai yang dapat dikatakan masih tradisional. Nilai-nilai yang mereka pahami dipengaruhi oleh keadaan alam yang keras dan penuh tantangan, serta menuntut penyesuaian nelayan dengan alam dan beranganggapan bahwa keberuntungan dan kesengsaraan sebagai bagian dari hidup. Mereka sangat menghargai adat-istiadat yang terkait dengan penangkapan ikan secara turun-temurun. Meskipun nilai-nilai tersebut secara ekonomi tidak menguntungkan dan bahkan tidak rasional atau masuk akal, meskipun pemahaman tersebut menghambat kreativitas dan inovasi untuk maju. Nelayan tradisional di kota Padang masih mempercayai adanya nilai-nilai; perempuan tidak boleh melaut, tidak boleh melaut siang hari Jum'at, berkata kotor sedang melaut, tidak melaut ketika badai, menunjuk benda-benda yang tidak di kenal sewaktu melaut, dilarang berbuat macam-macam (mesum), dan dilarang takabur.

Selain memahami nilai-nilai yang mereka pahami secara turun temurun, nilai-nilai hidup yang bersifat kegotong royongan masih hidup di masyarakat seperti: pada saat ditimpa musibah kematian, ada pesta perkawinan, dan hajatan lain (sunat rasul, akekah anak). Namun ada beberapa hal yang telah hilang di masyarakat nelayan adalah tidak adanya tuo pasie. Tuo pasie adalah : orang yang disegani di tengah masyarakat nelayan. Tuo pasie berperan sebagai penasehat dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat nelayan. Seperti larangan kelaut pada hari jumat itu lahir dari tuo pasie. Namun sekarang banyak hal tersebut dilanggar. Hal lain yang telah hilang adalah : Berdoa jika ada nelayan-nelayan baru yang akan turun melaut. Berdoa ini langsung dipimpin oleh tuo pasie

bersama seluruh masyarakat pasie agar nelayan baru tersebut selalu mendapat ikan yang banyak. Seluruh makanan dibawa oleh keluarga nelayan baru dan makan bersama di pinggir pantai. Dari hasil wawancara semenjak tidak ada lagi tuo pasie, nelayan selalu konflik dalam hal menangkap ikan di laut, karena melanggar perjanjian antar kelompok nelayan. Sebagai contoh nelayan jaring udang harus menangkap pada malam hari, namun didapati ada yang menangkap pada sore dan pagi hari. Purnomo (2005) mengemukakan bahwa konflik antar nelayan masih cukup tinggi disebabkan oleh perebutan perairan penangkapan. Oleh karena itu bagi masyarakat nelayan, kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai ”pedoman kehidupan”, referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Keesing, 1989:68-69). Faktor lain dalam budaya masyarakat nelayan adalah menempatkan perempuan mendominasi dalam urusan ekonomi keluarga dan pengambilan keputusan penting dirumah tangga (Kusnadi, 2001).

3.3.5 Pola Hidup Masyarakat Nelayan

Bagi masyarakat nelayan tradisional di kota Padang, aktivitas menangkap ikan merupakan mata pencarian yang bersifat turun temurun sebagai penghidupan ekonomi keluarga. Aktivitas nelayan tradisional di kota Padang sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis. Di samping itu, nelayan tradisional di kota Padang memandang pendapatan mereka dapatkan dari usaha melaut hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mereka bekerja menurut kebiasaan mereka sehari-hari. Apabila cuaca baik, mereka akan mulai melaut. Dengan kebiasaan berangkat pagi sesudah subuh, malam harinya mereka dapat beristirahat. Siangnya mereka dapat memperbaiki jaring mereka di waktu luang. Pagi dan sore mereka dapat menjual ikan di tepi pantai atau ke pasar.

Kebiasaan yang berkembang di kalangan masyarakat nelayan adalah: boros, judi dan minum beralkohol. Prilaku ini sudah berkembang lama sejak dulu, jika dulu mereka terbiasa minum dengan minuman tradisional, tapi kini telah berubah pada minuman modern. Kebiasaan ini telah terpola dan terorganisir. Sebagian nelayan tradisional di kota Padang, pandangan mereka telah mulai berubah mengenai “takdir tuhan atau jalan hidup mereka berada pada usaha mereka”, dulu memang sikap mereka banyak menganut faham bahwa “takdir atau jalan hidup mereka telah digariskan oleh Tuhan”. Kebiasaan ini menunjukkan adanya sebagian kebiasaan yang masih dipertahankan dan sebagaian lagi telah mengalami perubahan. Jika dilihat dari pola hidup masyarakat nelayan di Kota Padang umumya mereka membeli barang-barang yang tidak mendukung kehidupan mereka, hal ini terlihat dari barang-barang yang mereka miliki adalah: TV, dan parabola sebagai hiburan mereka, serta pada umunya

nelayan memiliki sepeda motor yang mereka peroleh dari hasil melaut. Tidak ada mereka yang memiliki aset berupa emas dan tabungan uang di bank. Pola hidup yang bersaing antar tetangga dalam memiliki sesuatu salah satu pemicu mereka dalam berhutang untuk bersaing dalam memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Hidup boros masih kental terlihat di masyarakat nelayan di Kota Padang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ariyanti dan Santoso (2015) mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan perikanan tangkap disebabkan oleh pola konsumsi nelayan cendrung membelanjakan pendapatannya pada saat itu juga.

3.3.6 Usaha wanita nelayan

Kontribusi wanita nelayan terhadap pendapatan keluarga bagi masyarakat nelayan di kawasan pesisir terlihat nyata dari seratus istri nelayan yang diwawancarai diperoleh hasil sebagai berikut (Tabel 4.8).

Tabel 3.8. Kontribusi Usaha Wanita nelayan terhadap pendapatan Keluarga

No.	Pekerjaan istri nelayan	Jumlah (orang)	Pendapatan rata-rata (Rp)/hari
1	Tidak bekerja	53	-
2	Pengolah ikan	25	30.000
3	Penjual kue	10	30.000 – 50.000
4	Membuka warung	12	50.000 – 75.000

Sumber : Data Hasil Penelitian 2015

Dari Tabel 3.8 Terlihat bahwa banyaknya wanita nelayan yang tidak membantu ekonomi keluarga (53%), sisanya 47% wanita nelayan membantu suaminya untuk membantu pendapatan keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Saidan (1998) wanita nelayan perlu berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, Junaidi (2012) wanita nelayan berperan aktif meningkatkan ekonomi keluarga sebagai pengolah namun terkendala oleh kemasan dan lebelling produk. Akbarini, Gumilar, dan Garandiosa (2012) istri nelayan menyumbang 31,32% untuk ekonomi keluarga. Hasil lain yang dikemukakan oleh Zein (2008) juga menunjukkan bahwa kontribusi wanita nelayan terhadap pendapatan keluarga di Kecamatan Koto Tangah di Kota Padang rata-rata sebesar 37,62%. Apa yang ditemukakan di penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Zein di tahun 2008.

3.3.7 Aset

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 orang nelayan di Kota Padang diperoleh data mengenai kepemilikan aset dalam bentuk kepemilikan rumah dan aset lain yang dimiliki nelayan dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.9 Aset Kondisi Rumah Masyarakat Nelayan di Kota Padang

No.	Umur nelayan	Kepemilikan rumah	Penerangan	Atap rumah	WC	lantai rumah	bahan bakar
	20 - 21 (12 org)	65 org milik sendiri	100 org listrik/pln	95 org seng	85 org dalam rumah	80 org semen	46 org gas
	31- 40 (22 org)	21 org menyewa		4 org genteng	9 org wc umum	3 org keramik	39 minyak tanah
	41-50 (35 org)	11 rumah milik org tua		1 org rumbia	6 org sepanjang pantai	7 org papan	15 kayu bakar
	51-60 (24 org)	2 org rumah mertua				10 org tanah	
	61-70 (17 org)	1 org rumah hibah					

Sumber: Data Hasil Penelitian 2015

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa aset rumah tangga masyarakat nelayan yang dulunya wc mereka di sepanjang pantai telah berobah kepada wc yang mereka buat di dalam rumah. Dari bahan bakar yang dulunya mereka memasak dengan menggunakan bahan bakar kayu saat ini telah beralih menjadi bahan bakar gas dan bahan bakar minyak tanah. Atap rumah mereka pada umunya beratap seng dan umunya mereka memiliki rumah sendiri, rumah orang tua, sewa, rumah mertua, dan hibah. Lantai rumah rata-rata berlantai semen, namun masih ditemui yang menggunakan lantai tanah. Pada umunya masyarakat nelayan di Kota Padang penerangan rumah mereka memiliki penerang listrik. Rata-rata umur nelayan di Kota padang adalah: 41 – 50 (35 orang nelayan), 51 – 60 (24 orang), 31 – 40 (22 orang), 61 – 70 (17 orang), 20 – 21 (12 orang). Dari gambaran ini terlihat bahwa kebanyakan yang menjadi nelayan adalah umur di atas 40 tahun sebanyak 88%. Berdasarkan hasil wawancara menjadi nelayan adalah pilihan hidup mereka yang telah turun temurun dilakukan semenjak orangtua mereka hidup dan bertempat tinggal di kawasan pesisir. Aset lain yang dimiliki oleh masyarakat nelayan berupa aset hiburan, transportasi, tabungan dan aset emas seperti terlihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 3.10. Kepemilikan Aset lain Masyarakat Nelayan

No	Kepemilikan aset			
	Hiburan (org)	Transportasi (org)	Tabungan (org)	Emas (org)
1	TV (80)	Sepeda motor (75)	Tidak ada (91)	Ada (14)
2	TV dan Radio (4)	Tidak ada (24)	Ada (9)	Tdk ada (86)
3	TV, Radio, & Parabola (10)	Becak (1)		
4	Tidak memiliki (6)			

Sumber: Data Hasil Penelitian 2015

Dari Tabel 3.10 terlihat bahwa pada umumnya nelayan memiliki media informasi dan hiburan berupa TV, kenderaan bermotor, namun sedikit sekali yang memiliki tabungan dan aset berupa emas. Dari seratus orang nelayan yang diwawancarai yang memiliki tabungan keluarga nelayan hanya 9 orang dan yang memiliki aset emas 14 orang. Sementara aset produktif lainnya seperti aset perahu, alat tangkap, dan mesin tidak mereka miliki. Jika aset-aset produktif ini habis maka mereka kembali menjadi pekerja, bukan sebagai pemilik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yonvitner (2014) mengemukakan bahwa implikasi turunnya nilai aset (kapal, mesin, dan alat tangkap) akan mengurangi efektivitas dan optimalisasi aset tersebut. Umumnya penyusutan aset dibebankan kepada nelayan oleh pemilik dan dimasukkan sebagai biaya kotor. Hasil penelitian Pramono (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan aset dan modal sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Sementara jenis pekerjaan dan jumlah tanggungan berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, Junaidi, Zein (2014) menunjukkan bahwa nelayan yang memiliki aset tetap memiliki pendapatan lebih tinggi dari nelayan yang memiliki aset lancar dan aset tidak berwujud. Rata-rata pendapatan nelayan tradisional di Nagari Tiku Rp. 1.687.000 – Rp. 3.800.000/bulan. Nelayan yang memiliki aset tak berwujud memiliki pendapatan yang rendah. Oleh karena kepemilikan aset yang dimiliki nelayan bukanlah aset yang produktif sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kemiskinan mereka. Jika aset produktif yang mereka miliki seperti adanya ternak, kebun, dan lahan sawah hal ini akan memperbaiki kehidupan mereka. Oleh karena itu pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka perlu kiranya bantuan itu berupa aset produktif.

BAB IV
STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DARI FAKTOR INTERNAL

1. Bantuan terus digulirkan oleh pemerintah agar status kepemilikan alat dari pekerja menjadi pemilik. Jenis alat yang diberikan berupa alat tangkap ramah lingkungan.
2. Jenis alat pukat payang dan pukat tepi perlu dicarikan pengganti alat tangkap tersebut, hal ini disebabkan dalam jangka panjang dapat memutus rantai makanan ikan.
3. Perlu pembebasan biaya sekolah bagi anak-anak nelayan dan pemberian beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi.
4. Perlu peningkatan mentalitas dalam upaya menciptakan masyarakat yang berbudaya melalui ceramah-ceramah agama oleh para ustad-ustad.
5. Upaya penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan perlu dilakukan terhadap wanita-wanita nelayan agar hidup tidak konsumtif dan perlu penyuluhan arti pentingnya menabung.
6. Kontribusi wanita nelayan terhadap peningkatan pendapatan terus ditingkatkan melalui usaha-usaha produktif dan pelatihan-pelatihan keterampilan berwirausaha dan penguatan permodalan serta kemasan dan labeling produk.
7. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan berupa alat tangkap, perahu, dan mesin tempel, namun perlu juga berupa aset lain seperti: ternak, lahan, dan perumahan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan:

1. Masih ditemukan nelayan yang belum memiliki alat tangkap (26%).
2. Jumlah alat tangkap pukat payang yang mendominasi penangkap ikan di kota Padang.
3. Pendidikan nelayan rata-rata adalah didominasi oleh tamatan SD dan masih ditemui tidak tamat SD serta tidak sekolah serta.
4. Budaya masyarakat nelayan masih tetap dipertahankan seperti wanita dilarang melut, hari jum'at tidak melaut, dilarang berkata-kata kotor takabur dan merusak.
5. Pola konsumtif nelayan terkait dalam kompetisi antar masyarakat nelayan memiliki alat-alat tidak produktif, seperti kendaraan sepeda motor,TV,dan parabola. Sekalipun berhutang untuk mendapatkannya.
6. Tingkat kontribusi wanita nelayan terhadap pendapatan seperti menjual kue (Rp.50.000/ hari), pengolah (Rp.30.000/hari) dan membuka warung (Rp.70.000/hari).
7. Sedikit sekali nelayan yang memiliki aset berupa tabungan dan emas.

5.2 Saran

1. Pemberian bantuan haruslah tepat sasaran kepada nelayan miskin.
2. Bantuan haruslah mengacu kepada jenis alat tangkap yang ramah lingkungan.
3. Perlu pemerintah membebaskan anak-anak nelayan dari biaya sekolah dan pemberian beasiswa kepada anak-anak nelayan untuk masuk perguruan tinggi.
4. Budaya-buadaya lokal perlu di kembali untuk menumbuhkan kearifan lokal seperti sedekah laut, dan tuo pasie
5. Penyuluhan dan pelatihan perlu dilakukan pada usia dini tentang pentingnya budaya hemat dan menabung.
6. Kontribusi wanita nelayan perlu terus ditingkatkan pada usaha-usaha produktif serta pengemasan dan labeling terhadap usaha-usaha yang dijalankan.
7. Pemberian aset berupa ternak, perumahan dan lahan perlu diupayakan pemerintah melalui program pemberdayaan.

BAB VI
FAKTOR EKSTERNAL KEMISKINAN NELAYAN KOTA PADANG

6.1 Visi dan Misi Kota Padang

Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang yang telah dilantik pada Tanggal 13 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

"*Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya*"

Pembuatan visi ini sudah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam Pemilhan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Padang yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam pemilukada tahun 2014 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu:

1. *Pendidikan*, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangat jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdaya manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memanfaatkan dan memelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia sehingga kegiatan produksi dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan;
2. *Perdagangan*, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi Kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga

kota. Jiwa wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan tersebut;

3. *Pariwisata*, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien;
4. Aspek agama (*religius*), baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat;
5. Tata kehidupan masyarakatnya di dasarkan pada budaya lokal, khususnya *Budaya Minangkabau* dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat;

Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan melalui misi yang pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat mewujudlan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan,

Untuk mewujudkan visi Kota Padang maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Berdasarkan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan di atas, maka tujuan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Padang sebagai sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya;
2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*)
3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya;
4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Sasaran umum Pembangunan kota Padang dengan memperhatikan visi dan misi sebagaimana dijelaskan diatas, dan mengingat fungsi Kota Padang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), maka sasaran umum pembangunan Kota Padang secara lebih kongkrit mencakup 4 hal pokok yang masing-masingnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Padang yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Publik (*Service Center*) dengan kegiatan utama meliputi pendidikan dan kesehatan untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah serta pusat pemerintahan untuk Provinsi Sumatera Barat.
2. Terciptanya Kota Padang yang juga berfungsi sebagai Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*) dengan kegiatan utama ditekankan pada bidang perdagangan, jasa dan pariwisata untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah.
3. Terlaksananya Kota Padang sebagai *Kota layak huni* yang mempunyai prasarana dan sarana yang cukup dan berkualitas baik serta lingkungan hidup yang menyenangkan dan bebas dari kemungkinan bencana alam.
4. Terciptanya masyarakat yang sejahtera, religius dan berbudaya berdasarkan pada falsafah "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"*.

Adapun Agenda pembangunan Kota Padang pada Tahun 2014 -2019, adalah:

1. Peningkatan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
2. Pengembangan Kota Padang sebagai pusat Perdagangan
3. Pengembangan Kota Padang sebagai Kota Wisata dan berdaya saing
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan
6. Peningkatan keamanan dan kebersihan kota

7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kota Padang

Pembangunan Kota Padang pada Tahun 2014-2019 juga diarahkan pada 10 Program Prioritas Pembangunan Kota Padang, yaitu:

1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi
2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
3. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota
4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing
5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana
9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik.
10. Pengamalan Agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya

Sesuai dengan 10 program prioritas Pembangunan Kota Padang 2014 – 2019, maka tujuan program prioritas nomor 4 dan 7 menyangkut : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, oleh karena itu Program sektor perikanan khususnya perikanan tradisional yang merupakan penghuni kawasan pesisir menjadi sasaran utama visi dan misi Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Padang. Dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dan penurunan angka kemiskinan di kawasan pesisir berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Jika kita lihat program pemerintahan pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

6.2 Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

ASEAN Economic Community (AEC) 2015 atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan dihelat 31 Desember 2015. MEA 2015 sendiri terinspirasi dari Uni Eropa, dimana tarif perdagangan tak berlaku alias nol (0) persen, dan produksi barang-jasa akan dipasarkan secara bebas di 10 negara ASEAN. Siapkah sektor Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia menyongsong MEA 2015. Untuk menyiapkan itu, Pemerintahan SBY pada 1 September 2014 menerbitkan Instruksi Presiden No.6

Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing dalam Rangka Menghadapi MEA. Wabilkhusus di sektor KP, Inpres itu melahirkan empat strategi: Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan; penguatan daya saing kelautan dan perikanan; penguatan pasar dalam negeri; serta penguatan dan peningkatan pasar ekspor.

Sejauh mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbenah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era perdagangan bebas ASEAN yang tinggal menghitung bulan itu? Berikut rangkuman dari berbagai sumber informasi terkait kebijakan KKP yang di pemerintahan Jokowi-JK ini kementeriannya selalu disorot dengan gebrakan-gebrakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

6.2.1 Penguatan Kelembagaan & Posisi Kelautan Perikanan

Langkah ini telah dilakukan pemerintah bersama DPR dengan mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan yang mandek selama 10 tahun pembahasannya di DPR. Akhirnya, setelah 69 tahun Indonesia merdeka, kita punya Undang-Undang Kelautan. Di Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini diharapkan bisa menyederhanakan regulasi pengelolaan laut yang kerap dinilai tumpang tindih antarsektor. UU Kelautan ini dapat mendorong percepatan realisasi investasi di sektor kelautan dan perikanan karena produk hukum ini telah menyederhanakan berbagai regulasi dalam hal pengelolaan laut. UU Kelautan itu juga penting karena selama ini pembangunan bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional sehingga pembangunan bidang kelautan tertatih mengejar pesatnya pembangunan daratan.

6.2.2 Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

Strategi ini meliputi menyusun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN); pengembangan industri perikanan tangkap salah satunya dengan penyempurnaan regulasi investasi dan usaha perikanan tangkap; penguatan kapasitas pengolahan hasil perikanansalah satunya dengan peningkatan utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI); penguatan sistem jaminan mutu hasil perikanan; pengembangan investasi di pulau-pulau kecil; pengembangan mina wisata; pengembangan perikanan budidaya; penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan perikanan; serta meningkatkan daya saing tenaga kerja perikanan Indonesia.

6.2.3 Penguatan Pasar Dalam Negeri

Strategi ini meliputi pengembangan Early Warning System (EWS) sebagai antisipasi lonjakan harga dan pengamanan ketersediaan produk perikanan serta pengembangan informasi pasar berbasis teknologi informasi.

6.2.4 Penguatan Pasar Ekspor

Strategi ini meliputi branding produk perikanan di pasar internasional, market intelegence pasar intenasional, serta diversifikasi pasar ekspor. Langkah KKP untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan dan kelautan salah satunya adalah mengindentifikasi daerah yang baik untuk budidaya atau penangkapan ikan. Kemudian akan disesuaikan dengan program-program KKP sehingga diharapkan menjadi lumbung ikan dan memiliki nilai untuk ekspor.

Kesimpulannya, jika empat strategi di atas dimaksimalkan, Indonesia harus optimistis menghadapi MEA 2015 dan bukan tidak mungkin kita akan menjadi pemimpin dalam era perdagangan bebas itu. Kepala Pusat Analisis Kerjasama Internasional Lembaga KKP Anang Noegroho menyebut dengan potensi laut kita yang mencapai 171 miliar Dollar AS per tahun, dan tidak seharusnya kita memiliki hutang luar negeri. Mari kita dukung terus Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan segala gebrakan dan akselerasinya untuk pembangunan maritim nasional. Kita juga berharap, fokus KKP bukan hanya memberantas illegal fishing saja.Tapi juga melahirkan kebijakan strategis lainnya.(IRIBIndonesia/SIperubahan/Poros maritim/PH)'.

6.3 Permasalahan Sektor Perikanan

Berdasarkan program tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam sektor perikanan dalam melaksanakan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019. Yang tertuang dalam PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMEN-KP/2015. Permasalahan tersebut adalah :

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan

pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing.*

Selain itu, praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari *IUU fishing* di perairan Arafura diperkirakan mencapai Rp 11–17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negara-negara di dunia akibat IUU fishing mencapai US$ 10–23,5 miliar (Agnew dkk, 2005). Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan 13 sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional dalam penanggulangan kegiatan *IUU fishing*. Masalah *IUU fishing* juga terkait dengan perbatasan dengan negara tetangga, khususnya terkait nelayan tradisional yang melanggar lintas batas ke negara lain. Meskipun upaya untuk edukasi dan peningkatan keasadaran nelayan RI mengenai batas-batas laut sudah dilakukan namun kemungkinan nelayan tradisional untuk melintas batas dan melakukan pelanggaran ke negara lain masih ada.

Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa masalah kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya

adalah skala kecil/tradisional (± 80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam 14 dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*).

Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam "*Agreement of Th Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*" (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pegaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan. Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan 15 sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan
keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih

sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor (termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah. Sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau-pulau *(Archipelagic State)* dimana laut Indonesia lebih luas dari daratan, laut menjadi sangat vital dalam pemerataan pembangunan nasional. Melalui visi misi Presiden, diharapkan laut dapat menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil didalamnya, sekaligus sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan).

6.4 Faktor eksternal Kemiskinan Nelayan

6.4.1 Kebijakan Program Bantuan Kementeri Kelautan Perikanan

Program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mengentaskan kemiskinan nelayan tradisional telah banyak dilakukan baik berupa bantuan kapal perikanan, alat tangkap, dan program pensejahteraan melalui program bantuan tunai untuk operasional penangkapan melalui kelompok nelayan. Program-program tersebut digulirkan melalaui dana APBN dan dana DAK (Dana Alokasi Khusus). Proses pengguliran dana tersebut melalui persetujuan DPR Pusat, setelah proses persetujuan maka KKP melakukan penyaluran ke berbagai provinsi yang memerlukan bantuan tersebut. Pemerintah provinsi melakukan fasilitasi sesuai perintah KKP sebagai penerima bantuan yang telah diprogramkan oleh KKP pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rancang Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan(Agus Wahyu Santoso, MT), serta Ibu Innes Rahmania Direktur Akses Pasar dan Promosi.



Gambar 6.1: wawancara dengan Bpk. Agus Wahyu Santoso, MT dan Ibu Innes Rahmania

Bantuan tersebut disalurkan sesuai dengan perintah dan petunjuk dari KKP Pusat melalui kelompok nelayan yang telah dibetuk secara kelompok oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum bantuan diberikan oleh Provinsi Sumatera Barat Yaitu:

1. Pembentukan kelompok nelayan penerima bantuan
2. Pelatihan Kelompok Nelayan penerima bantuan
3. Sosialisasi aturan dan tatacara pengguna angaran dan pelaporan
4. Serah terima bantuan oleh KKP pusat kepada Nelayan Penerima Bantuan
5. Monitoring pelaksanaan dan hasil serta pelaporan oleh penerima Bantuan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

6. Yang tidak pernah dilakukan adalah evaluasi tingkat keberhasilan dan dampak bantuan terhadap nelayan

Besar anggaran per satu unit kapal adalah Rp. 2 Milyar untuk Sumatera Barat diberikanan sebanyak 10 unit Kapal dengan dana operasional pada tahap awal sebesar Rp. 200 juta rupiah per kelompok. Setelah kapal diberikan dan bantuan digulirkan sampai saat ini belum ada evaluasi apakah ada keberhasilan para nelayan penerima bantuan tersebut atau tidak. Persoalan yang timbul adalah : besarnya dana operasi tidak setimpal dengan hasil tangkapan yang diperoleh oleh karena itu kapal-kapal bantuan tersebut banyak bersandar dari pada beroperasi. Sementara dana operasional kelompok telah habis dipergunakan untuk melaut. Hingga saat ini kapal-kapal tersebut banyak tidak beroperasi.

Hasil wawancara dengan bapak Agus tersebut mengemukakan kelemahan ada pada evaluasi yang tidak dilakukan baik sebelum ataupun sesudah bantuan diberikan. Pada saat ini kata beliau baru akan di buat sistem evaluasi oleh KKP pusat. Gambaran ini menunjukkan bahwa ketidak siapan pemerintah dalam melakukan evaluasi baik sebelum dan sesudah dilakukan bantuan. Kapal-kapal yang diterima nelayan tidak disesuaikan dengan situasi musim, kondisi laut, dan model dan bentuk kapal sehingga untuk Sumatera Barat yang merupakan lautan samudera Hindia dengan gelombang yang besar, maka diragukan daya tahan kapal tersebut dalam beroperasi di laut bebas. Para nelayan mengeluh bahwa kapal tersebut tidak sesuai dengan kondisi alam laut Sumatera Barat. Terlebih lagi mentalitas nelayan yang biasanya pergi pagi pulang sore hari, tidak membuat nelayan betah melaut untuk satu minggu. Hal ini menyebabkan kegagalan dari bantuan KKP pusat dalam menyalurkan bantuan. Kegagalan kebijakan merupakan kesalahan eksternal pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan nelayan.

Gagasan kemiskinan dalam upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan intervensi oleh pemerintah atau agen eksternal lainnya (Hyatt, 2001); dan dimensi multisektoral yang berpendapat bahwa kemiskinan bukan merupakan masalah individu sendiri atau masalah struktural saja tetapi kombinasi dari keduanya (Jentoft & Midré, 2011; Alkire & Foster, 2008; Bene 2003; Hanson 1997).



Gambar: 6.2 Kapal Inka Mina yg tidak beroperasi di Pelabuhan Bungus Padang

Sebagai gambaran kesalahan kebijakan juga membawa efek kepada masyarakat nelayan yang mana ribuan nelayan melakukan demo kepada Gubernur Sumatera Barat tentang nasib mereka, berkaitan dengan Permen No. 2 Tahun 2015 pelarangan Pukat Tepi dan Pukat Payang, serta Permen No.42 Tahun 2013 pelarangan bagan. Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah juga tidak diikuti oleh solusi yang memberikan pertimbangan perbaikan kehidupan mereka, sehingga menuai demo pada saat penelitian ini dilakukan seperti terlihat pada gambar dibawah ini:






Gambar: 6.3 Demo penolakan pelarangan bagan, dan pukat

Prinsip tata kelola nelayan miskin sebagai mitra dalam pengentasan kemiskinan di perikanan skala kecil adalah masalah praktis. Nelayan yang sehari-hari terlibat dalam menangani kebutuhan mereka. Dalam kebanyakan kasus mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan lingkungan mereka. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana untuk manuver di desa mereka. Memang mereka bisa disebut sebagai practitioners ahli kehidupan sehari-hari '(Holstein & Gubrium, 2003) atau poverty ahli' menurut Narayan et al. (2000). Untuk alasan ini, penting untuk melihat mereka sebagai mitra daripada klien dalam memerangi kemiskinan. Mereka tidak harus dipandang sebagai subyek kemiskinan, yang hanya perlu dibantu. Baik mereka harus dilihat sebagai kekurangan, putus asa dan tanpa kemampuan. Sebaliknya mereka harus dilihat sebagai orang-orang dengan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan tentang masalah mereka dan bagaimana menyelesaikannya.

Pendapat lain faktor eksternal kemiskinan nelayan menurut Trijoyo (2007) faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan : dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Faktor-faktor eksternal mencakup masalah antara lain: (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional; (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; (5) penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan; (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca-tangkap; (7) terbatasnya peluang-peluang kerja disektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

6.5 Kebijakan Program Bantuan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan program bantuan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat di danai dari APBD Sumatera Barat. Sesuai program pak Gubernur yang disebut dengan Gepem (Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) khususnya kawasan pesisir, telah digulirkan kepada masyarakat nelayan. Sessuai dengan prosedur pemberian bantuan, bahwa penerima harus terdaftar di dalam KK masyarakat miskin. Tehnik pemberian bantuan benar-benar dilakukan terhadap masyarakat yang tidak memiliki alat tangkap, mesin, dan perahu. Proses pemberian ini benar-benar dilakukan sesuai dengan juklak penerima bantuan. Adapun prosedur tersebut adalah : seperti berikut :

6.5.1 PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGADAAN GILLNET MONOFILAMENT

I. PENDAHULUAN

Propinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber hidup dan kehidupan bagi masyarakat nelayan Sumatera Barat. Namun rendahnya sumberdaya masyarakat nelayan kita, maka peluang pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) perlu dilakukan dalam bentuk bantuan sarana penangkapan berupa gillnet monofilament.

Gill net sering diterjemahkan dengan “jaring insang”, “jaring rahang”, “jaring” dan lain-lain. Istilah gill net didasarkan pada pemikiran bahwa ikan-ikan yang tertangkap ”*gill net*” terjerat disekitar operculumnya pada mata jaring. Dalam bahasa jepang, gill net disebut dengan istilah ”*sasi ami*”, yang berdasarkan pemikiran bahwa tertangkapnya ikan-ikan pada *gill net*, ialah dengan proses dengan proses bahwa ikan-ikan tersebut ”menusukkan diri-*sasu*” pada ”jaring-*ami*”. Di Indonesia, penamaan gill net ini beraneka ragam, ada yang menyebutnya berdasarkan jenis ikan yang tertangkap (jaring koro, jaring udang, dan sebagainya), ada pula yang disertai dengan nama tempat (jaring udang Bayeman), dan sebagainya (Ayodhyoa, 1981).

Pada umumnya, yang disebutkan dengan gill net ialah jaring yang berbentuk empat persegi panjang, mempunyai mata jaring yang sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya.

Tertangkapnya ikan-ikan dengan gill net ialah dengan cara ikan-ikan tersebut terjerat (*gilled*) pada mata jaring ataupun terbelit (*entangled*) pada tubuh jaring. Pada umumnya ikan-ikan yang menjadi tujuan penangkapannya ialah jenis ikan yang *horizontal migration* dan *vertikal migration*-nya tidak seberapa aktif. Dengan perkataan lain, *migration* dari ikan-ikan tersebut terbatas pada suatu *range layer-depth* tertentu.

Prinsip penangkapan dengan gill net adalah dengan jalan memasang gill net tersebut di perairan yang sering dilewati ikan baik secara bergerombol maupun satu persatu. Ikan-ikan tertangkap karena menabrak jaring dan kemudian tersangkut atau terlibat/ tergulung oleh alat tersebut.

Karena pemasangan alat bertujuan agar dilanggar/ditabrak oleh ikan, maka sebaiknya warna jaring harus disesuaikan dengan warna perairan tempat gill net akan dioperasikan, atau kadang-kadang dipergunakan bahan yang transparan untuk pembuatan alat tersebut, seperti monofilament agar jaring tersebut tidak dapat dilihat oleh ikan bila dipasang di perairan.

Untuk itu, disusunlah Petunjuk Teknis ini guna memudahkan dan memperlancar tugas-tugas di lapangan.

1.2 Tujuan pelaksanaan kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir berupa bantuan Gillnet Monofilament adalah :

1. Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
2. Menyebarluaskan teknologi penangkapan tepat guna dengan menggunakan alat tangkap yang lebih efisien dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nelayan.
3. Melakukan pembinaan secara langsung terhadap nelayan yang bersangkutan baik teknis maupun manajemen penangkapan.
4. Peningkatan ketersediaan sarana perikanan tangkap gillnet monofilament.

1.2 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah kk miskin yang berada diwilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan sesuai dengan data BPS tahun 2008. dalam bentuk pemberian bantuan alat tangkap gillnet monofilament untuk meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan tersebut.

II. METODE PELAKSANAAN

2.1 Dasar pelaksanaan

a. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir berupa pengadaan bantuan gillnet monofilament, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014.

b. Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014.

2.2 Lokasi kegiatan

Lokasi kegiatan adalah Kabupaten Kep. Mentawai, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan, dengan alat tangkap sesuai daerah setempat.

2.3 Pengadaan paket :

Jenis kegiatan : Pengadaan gillnet monofilament sebanyak 85 unit siap operasional.

2.4 Distribusi alokasi paket:

Kab. Kep. Mentawai sebanyak 10 unit, Kab. Pasaman Barat sebanyak 30 unit, Kab.Padang Pariaman sebanyak 10 unit, Kota Padang sebanyak 10 unit dan Kab. Pesisir Selatan 25 unit.

2.5 Proses

a. Pembentukan Tim Identifikasi Tingkat Provinsi dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

b. Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten / Kota membuat usulan calon penerima paket gillnet monofilament Tahun 2014.
c. Tim Identifikasi Tingkat Provinsi yang ditunjuk bersama petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota melakukan Identifikasi terhadap nelayan calon penerima paket sesuai usulan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota terkait.
d. Hasil Identifikasi di lapangan dievaluasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
e. Calon penerima paket yang telah lolos seleksi ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

2.6 Kriteria kelompok penerima paket alat tangkap

a. Merupakan anggota kelompok nelayan (KUB) / Koperasi Perikanan yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota terkait.
b. Berdomisili tetap dengan pekerjaan utama sebagai nelayan.
c. Sanggup mengoperasikan dan memelihara paket secara optimal.
d. Direkomendasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota terkait.

2.7 Mekanisme penerimaan paket

a. Penyedia barang menyerahkan paket yang disediakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam berita acara serah terima paket.
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan paket yang telah disediakan ke Dinas Kelautan dan Perikanan berupa berita acara serah terima.
c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama penyedia barang (paket) menyerahkan ke masing - masing penerima melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota terkait yang selanjutnya diteruskan kepada calon penerima paket berdasarkan Surat Keputusan.

2.8 Penanggung jawab pengelola paket :

a. Penanggung jawab pengelolaan paket adalah penerima paket yaitu: nelayan yang tergabung dalam KUB
b. Penerima paket bertanggungjawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota terkait.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pembinaan bagi keberlanjutan operasional paket yang telah diserahkan kepada KK Miskin dengan mata pencaharian Nelayan penerima paket gepemp di daerah binaannya.

III. MONITORING DAN PEMBINAAN

3.1 Monitoring

Kegiatan Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota mulai dari identifikasi, seleksi nelayan, penyerahan dan perkembangan bantuan pengadaan gillnet monofilament.

3.2 Pembinaan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota melakukan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat.

V. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam bentuk pengadaan gillnet monofilamen ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Program : Gerakan Terpadu Pensejahteraan Ekonomi Nelayan

Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu

Sub Kegiatan : Pemberian Paket Bantuan Gillnet Monofilament Sebanyak 100 Unit

Lokasi : Kab.Pasaman Barat 30 unit, Kab. Padang Pariaman 10 unit, Kota Padang, 10 unit, Pesisir Selatan 25 unit. Kab. Mentawai, 10 unit

Tabel 6.1 Rencana Anggaran Biaya Spesifikasi Teknis Jaring Kabupaten dan Kota

No	Spesifikasi Teknis	Volume	Jumlah (Rp)
	Jaring (webbing) : PA Monofylament D.025, mesh size 2 inchi, ukuran jaring : ML 100 yard, MD 100, S 30, Jenis Jaring TATE/DK, Ukuran panjang tiap set : 65 meter ***Kelengkapan Jaring :*** • Tali ris atas : PE diameter 5 mm, pjg 67 m, 2 bh • Tali ris bawah : PE diameter 3 mm, pjg 67 m, 2 bh • Tali pemberat : PE 3 mm • Tali pelampung : PE 5 mm • Pelampung : bahan gabus /kenyal/sandal bulat, 100 bh • Pelampung tanda 1 bh • Pemberat : bahan timah 2,5 kg • Tali pengikat (sliket) : Benang Titoron No.6 , 1 gulung	1 piece	833.000,-
	Jumlah		833.000,-
	Pajan 10 %		83.300,-
	Jumlah harga 1 piece		916.300,-
	Jumlah harga 1 unit (12 piece x Rp. 916.300,-)		10.995.600,-
	Jumlah harga 100 unit (100 x Rp. 10.995.600,-)		**1.099.560.000,-**
	Dibulatkan		**1.100.000.000,-**

(*satu milyar seratus juta juta rupiah).*

Keterangan :

- 1 (satu) unit gillnet monofilament terdiri dari 12 piece.
- Seluruh jaring sudah terakit dan siap untuk dioperasionalkan.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Program : Gerakan Terpadu Pensejahteraan Ekonomi Nelayan

Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu

Sub Kegiatan : Pemberian Paket Bantuan Gillnet Monofilament Sebanyak 100 Unit*6

Lokasi : Kab.Kep. Mentawai, 20 unit.

Tabel 6.2 Rencana Anggaran Biaya Spesifikasi Teknis Jaring Kabupaten Mentawai

No	Spesifikasi Teknis	Volume	Jumlah (Rp)
	Jaring (webbing) : PA Monofylament D.025, mesh size 2 inchi, ukuran jaring : ML 100 yard, MD 100, S 30, Jenis Jaring TATE/DK, Ukuran panjang tiap set : 65 meter ***Kelengkapan Jaring :*** • Tali ris atas : PE diameter 5 mm, pjg 67 m, 2 bh • Tali ris bawah : PE diameter 3 mm, pjg 67 m, 2 bh • Tali pemberat : PE 3 mm • Tali pelampung : PE 5 mm • Pelampung : bahan gabus /kenyal/sandal bulat, 100 bh • Pelampung tanda 1 bh • Pemberat : bahan timah 2,5 kg • Tali pengikat (sliket) : Benang Titoron No.6 , 1 gulung	1 piece	833.000,-
	Jumlah harga 1 piece		833.000,-
	Jumlah harga 1 unit (12 piece x Rp. 833.000,-)		9.996.000,-
	Jumlah harga 20 unit (20 x Rp. 9.996.000,-)		**199.920.000,-**
	Transportasi penyerahan 20 gillnet ke Siberut Kab.Kep.Mentawai		13.000.000,-
	Jumlah		212.920.000,-
	Pajak 10 %		21.292.000,-
	Total		**239.998.000,-**
	Dibulatkan		**240.000.000,-**

(*dua ratus empat puluh juta rupiah).*

Keterangan :

- 1 (satu) unit gillnet monofilament terdiri dari 12 piece.
- Seluruh jaring sudah terakit dan siap untuk dioperasionalkan.

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Gerakan Terpadu Pensejahteraan Ekonomi Nelayan

Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu

Sub Kegiatan : Pemberian Paket Bantuan Gillnet Monofilament Sebanyak 100 Unit

Lokasi : Kab.Pasaman Barat 35 unit, Kab. Padang Pariaman 10 unit, Kota Pariaman 20 unit, Kota Padang, 20 unit, Pesisir Selatan 15 unit dan Kab. Kep. Mentawai, 20 unit.

Tabel 6.3 Harga Perkiraan Sendiri Spesifikasi Jaring Kabupaten dan Kota

No	Spesifikasi Teknis	Volume	Jumlah (Rp)
	Jaring (webbing) : PA Monofylament D.025, mesh size 2 inchi, ukuran jaring : ML 100 yard, MD 100, S 30, Jenis Jaring TATE/DK, Ukuran panjang tiap set : 65 meter ***Kelengkapan Jaring :*** • Tali ris atas : PE diameter 5 mm, pjg 67 m, 2 bh • Tali ris bawah : PE diameter 3 mm, pjg 67 m, 2 bh • Tali pemberat : PE 3 mm • Tali pelampung : PE 5 mm • Pelampung : bahan gabus /kenyal/sandal bulat, 100 bh • Pelampung tanda 1 bh • Pemberat : bahan timah 2,5 kg • Tali pengikat (sliket) : Benang Titoron No.6, 1 gulung	1 piece	825.500,-
	Harga 1 piece		825.500,-
	Jumlah harga 1 (satu) unit (12 piece) =12 x Rp.825.500,-		9.906.000,-
	Jumlah harga 120 unit = 120 x Rp. 9.906.000,-		1.188.720.000,-
	Transportasi penyerahan 20 gillnet ke Siberut Kab.Kep.Mentawai		8.000.000,-
	Jumlah		**1.196.720.000,-**
	Pajak 10 %		119.672.000,-
	Total		**1.316.372.000,-**

(*satu milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).*

Keterangan :

- 1 (satu) unit gillnet monofilament terdiri dari 12 piece.
- Seluruh jaring sudah terakit dan siap untuk dioperasionalkan.

a. SPESIFIKASI ALAT ATANGKAP

Paket bantuan Gill Net Monofilament terdiri dari spesifikasi masing-masing sebagai berikut :

Tabel 6.4 Spesifikasi Alat Tangkap

No	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan
	Jaring (webbing) :	1	Piece
	1. PA Monofylament D.025, mesh size 2 inchi, 2. Ukuran jaring : ML 100 yard, MD 100, S 30, 3. Jenis Jaring TATE/DK, 4. Ukuran panjang tiap set : 65 meter		
	Kelengkapan Jaring :		
	• Tali ris atas : PE diameter 5 mm, pjg 67 m, • Tali ris bawah : PE diameter 3 mm, pjg 67 m, • Tali pemberat : PE 3 mm		
	• Tali pelampung : PE 5 mm	2	Buah
	• Pelampung : bahan gabus /kenyal/sandal bulat, • Pelampung tanda,	2	Buah
	• Pemberat : bahan timah		
	• Tali pengikat (sliket) : Benang Titoron No.6		
		100	Buah
		1	Buah
		2,5	Kg
		1	Gulung

6.5.2 PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGADAAN LONG TAIL

II. PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber hidup dan kehidupan bagi masyarakat Sumatera Barat. Namun rendahnya sumberdaya masyarakat nelayan kita, maka peluang pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu kegiatan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) dalam bentuk pengadaan long tail kepada nelayan perlu dilakukan.

Adapun bentuk dari belum termanfaatkannya potensi sumberdaya tersebut dapat dilihat dari rendahnya produktivitas nelayan. Hal ini disebabkan sebagian besar nelayan tradisional masih menggunakan teknologi sederhana dengan hasil tangkapan relatif rendah. Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan harus terus diupayakan melalui kegiatan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) antara lain berupa pengadaan long tail yang dibiayai melalui dana APBD Tahun 2013. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas perlu disusun petunjuk teknis sesuai spesifikasi alat yang digunakan.

Untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan tangkap skala kecil (pengadaan long tail) di Sumatera Barat maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya yang di harapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) berupa pengadaan long tail adalah :

5. Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
6. Menyebarluaskan teknologi penangkapan tepat guna dengan menggunakan alat tangkap yang lebih efisien dan sarana penangkapan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nelayan.
7. Melakukan pembinaan secara langsung terhadap nelayan yang bersangkutan baik teknis maupun manajemen usaha.
8. Peningkatan taraf perekonomian masyarakat pesisir dengan menggunakan long tail.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) adalah KK miskin yang berada di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat sesuai dengan data BPS Tahun 2008 dengan memberikan bantuan long tail untuk meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan.

II. METODE PELAKSANAAN

2.1 Dasar pelaksanaan

a. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berupa pengadaan long tail Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014.

b. Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014.

2.2 Lokasi kegiatan

Lokasi kegiatan adalah Kabupaten Kep. Mentawai = 10 unit, Kabupaten Pasaman Barat = 90 unit, Kabupaten Padang Pariaman = 43 unit, Kota Padang = 50 unit dan Kabupaten Pesisir Selatan = 92 unit, dengan alat tangkap sesuai daerah setempat.

2.3 Pengadaan paket :

Jenis kegiatan : Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam bentuk Pengadaan Long tail sebanyak 285 unit siap operasional.

2.4 Distribusi alokasi paket:

a) Kab. Pesisir Selatan, 92 unit.
b) Kabupaten Pasaman Barat, 90 unit.
c) Kota Padang, 50 unit
d) Kab. Padang Pariaman, 43 unit
e) Kab.Kep. Mentawai, 10 unit

2.5 Proses

f. Pembentukan Tim Identifikasi Tingkat Provinsi dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
g. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota membuat usulan calon penerima paket long tail Tahun 2014 berdasarkan seleksi permohonan proposal dari nelayan yang berminat.
h. Tim Identifikasi Tingkat Provinsi yang ditunjuk bersama petugas Dinas Kabupaten/Kota melakukan Identifikasi terhadap nelayan calon penerima paket sesuai usulan Dinas Kabupaten Kabupaten / Kota terkait.
i. Hasil Identifikasi di lapangan dievaluasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
j. Calon penerima paket bantuan yang telah lolos seleksi ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

2.6 Kriteria kelompok penerima paket alat tangkap

- Merupakan anggota kelompok nelayan (KUB)/Koperasi Perikanan yang terdaftar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota terkait.
- Berdomisili tetap dengan pekerjaan utama sebagai nelayan.
- Sanggup mengoperasikan dan memelihara paket secara optimal Direkomendasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota terkait.

2.7 Mekanisme penerimaan paket

- Penyedia barang menyerahkan paket yang disediakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam berita acara serah terima paket.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan paket yang telah disediakan ke Dinas Kelautan dan Perikanan berupa berita acara serah terima.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama penyedia barang (paket) menyerahkan ke masing - masing penerima melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota yang selanjutnya diteruskan kepada nelayan berdasarkan Surat Keputusan.

2.8 Penanggung jawab pengelola paket

1. Penanggungjawab pengelolaan paket adalah penerima paket yaitu : nelayan yang tergabung dalam KUB.

2. Penerima paket bertanggungjawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota terkait.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota bertanggung jawab terhadap pembinaan bagi keberlanjutan operasional paket yang telah diserahkan kepada Koperasi Perikanan / Kelompok Nelayan di daerah binaannya.

2.9 Pegaturan lain.

a. Pengaturan penggunaan paket long tail yang telah diserahkan kepada KUB Nelayan menjadi tanggung jawab KUB yang bersangkutan.

III. MONITORING DAN PEMBINAAN

3.1. Monitoring

Kegiatan Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota mulai dari identifikasi, seleksi nelayan, penyerahan dan perkembangan bantuan pengadaan long tail ini.

3.2. Pembinaan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota melakukan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat.

V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir berupa pengadaan long tail ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

RAB LONG TAIL

Program : Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)

Kegiatan : Pemberian Paket Bantuan Long Tail Sebanyak 291 Unit

Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat 100 unit, Kota Padang 36 unit, Kab.Pesisir Selatan 105 unit, Kota

Pariaman 20 unit, Kab.Padang Pariaman 20 unit, Kab. Agam 10 unit

No.Rekening: 2.05.2.05.01.28.05.5.2.2.23.0009

Tabel 6.5 Rencana Anggaran Biaya Long Tail

No	Nama Pekejaan	Spesifikasi TeknIs	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Long Tail	**Spesifikasi Mesin** 1. Model :E Y-20 / 5 HP 2. Tipe Pendingin Udara, 4 Langkah, Horizontal 3. Isi langkah : 183 CC 4. Diameter 67 x 52 mm 5. Langkah torak : Berlawanan arah jarum jam dilihat dari sisi propeller 6. Minyak pelumas : SAE – 30/40 kelas CC 7. Busi : NGK.B – 6 HS 8. Bahan Bakar : Premium 9. Isi Tangki : 3,8 Liter 10. Sistim Start : Ditarik 11. Perlengkapan : 1 Set kunci busi Spesifikasi As Ketinting 1. Pipa Terompet : 38 cm 2. Pipa Panjang(slongsong) : 210 cm (galvanis) 3. As : 16 mm / 220 cm (Stainlesteel) 4. Sistem gear : (Stainlesteel) 5. Propeler : 16 cm (2 daun)	1 unit	3.090.500,-
	Jumlah 1 unit			3.090.500.,-
	Jumlah 291 unit (291 x Rp. 3.090.500)			899.335.500,-
	Pajak 10 %			89.933.550,-
	Jumlah			989.269.050,-
	Dibulatkan			989.400.000,-

(sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

RAB LONG TAIL

Program : Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)

Kegiatan : Pemberian Paket Bantuan Long Tail Sebanyak 20 Unit

Lokasi : Kabupaten Kepulauan Mentawai, 20 unit

No.Rekening: 2.05.2.05.01.28.05.5.2.2.23.0009

Tabel 6.6 Spesifikasi Long Tail Kab. Mentawai

No	Nama Pekejaan	Spesifikasi TeknIs	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Long Tail	**Spesifikasi Mesin** 1. Model :E Y-20 / 5 HP 2. Tipe Pendingin Udara, 4 Langkah, Horizontal 3. Isi langkah : 183 CC 4. Diameter 67 x 52 mm 5. Langkah torak : Berlawanan arah jarum jam dilihat dari sisi propeller 6. Minyak pelumas : SAE – 30/40 kelas CC 7. Busi : NGK.B – 6 HS 8. Bahan Bakar : Premium 9. Isi Tangki : 3,8 Liter 10. Sistim Start : Ditarik 11. Perlengkapan : 1 Set kunci busi Spesifikasi As Ketinting • Pipa Terompet : 38 cm • Pipa Panjang(slongsong) : 210 cm (galvanis) • As : 16 mm / 220 cm (Stainlesteel) • Sistem gear : (Stainlesteel) • Propeler : 16 cm (2 daun)	1 unit	3.090.500,-
	Jumlah 1 unit			3.090.500.,-
	Jumlah 20 unit (20 x Rp. 3.090.500)			61.810.000,-
	Transportasi penyerahan 20 long tail ke Siberut Kab.Kep.Mentawai			2.300.000,-
	Jumlah			64.110.000,-
	Pajak 10 %			6.411.000,-
	Total			70.521.000,-
	Dibulatkan			70.600.000,-

(tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Gerakan Terpadu Pensejahteraan Ekonomi Nelayan

Kegiatan : Pemberdayaan Desa Terpadu

Sub Kegiatan : Pengadaan Paket Bantuan Mesin Long Tail Sebanyak 311 unit

Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat 100 unit, Kota Padang 36 unit, Kab.Pesisir Selatan 105 unit, Kota Pariaman 20 unit, Kab.Padang Pariaman 20 unit, Kab. Agam 10 unit dan Kabupaten Kep. Mentawai 20 unit

No.Rekening : 2.05.2.05.01.28.05.5.2.2.23.0009

Tabel 6.7 Harga Perkiraan Sendiri Kabupaten dan Kota

No	Nama Pekejaan	Spesifikasi TeknIs	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Long Tail	**Spesifikasi Mesin** 1. Model :E Y-20 / 5 HP 2. Tipe Pendingin Udara, 4 Langkah, Horizontal 3. Isi langkah : 183 CC 4. Diameter 67 x 52 mm 5. Langkah torak : Berlawanan arah jarum jam dilihat dari sisi propeller 6. Minyak pelumas : SAE – 30/40 kelas CC 7. Busi : NGK.B – 6 HS 8. Bahan Bakar : Premium 9. Isi Tangki : 3,8 Liter 10. Sistim Start : Ditarik 11. Perlengkapan : 1 Set kunci busi Spesifikasi As Ketinting • Pipa Terompet : 38 cm • Pipa Panjang(slongsong) : 210 cm (galvanis) • As : 16 mm / 220 cm (Stainlesteel) • Sistem gear : (Stainlesteel) • Propeler : 16 cm (2 daun	1 unit	3.089.900,-
	Jumlah 1 unit			3.089.900.,-
	Jumlah 311 unit (311 x Rp. 3.089.900)			960.958.900 ,-
	Transportasi penyerahan 20 long tail ke Siberut Kab.Kep.Mentawai			2.000.000,-
	Jumlah			962.958.900 ,-
	Pajak 10 %			96.295.890,-
	Total			1.059.254.790,-

(satu milyar lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

IV. SPESIFIKASI ALAT TANGKAP

Paket bantuan ini terdiri dari Mesin Long Tail dan As Kentinting, yang spesifikasi masing-masing sebagai berikut :

Tabel 6.8 Spesifikasi Mesin Merk Robin

No	Nama Barang	Spesifikasi TeknIs	Volume	Satuan
.	Long Tail	**Merk : Robin** **Model : EY-20/5HP** 1. Tipe Pendingin Udara, 4 Langkah, Horizontal 2. Isi langkah : 183 CC 3. Diameter 67 x 52 mm 4. Langkah torak : Berlawanan arah jarum jam dilihat dari sisi propeller 5. Minyak pelumas : SAE – 30/40 kelas CC 6. Busi : NGK.B – 6 HS 7. Bahan Bakar : Premium 8. Isi Tangki : 3,8 Liter 9. Sistim Start : Ditarik 10.Perlengkapan : 1 Set kunci busi **As Ketinting** • Pipa Terompet : 38 cm • Pipa Panjang(slongsong) : 210 cm (galvanis) • As : 16 mm / 220 cm (Stainlesteel) • Sistem gear : (Stainlesteel) • Propeler : 16 cm (2 daun)	1	

Tabel 6.9 LOKASI PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LONG TAIL

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
1	Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan Lengayang Ranah Pesisir
2	Padang	Bungus Teluk Kabung Air Tawar Barat
3	Pariaman	Pariaman Utara
4	Padang Pariaman	Ualakan Tapakis Batang Anai
5	Agam	Tanjung Mutiara
6	Pasaman Barat	Sungai Aua Koto Balingka Kinali Sasak Ranah Pesisir Sungai Beremas
7	Kepulauan Mentawai	Muara Siberut

Kerangka Acuan Kerja (Kak) Pengadaan Tramel Net Pemberdayaan Desa Terpadu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

A. UMUM
NAMA SATUAN KERJA : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

LOKASI : Provinsi Sumatera Barat

B. PROGRAM : GERAKAN TERPADU PENSEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN

KEGIATAN : Pemberdayaan Desa Terpadu

6.5.3 SUB KEGIATAN : PENGADAAN PAKET BANTUAN TRAMEL NET.

III. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Propinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber hidup dan kehidupan bagi masyarakat nelayan Sumatera Barat. Namun rendahnya sumberdaya masyarakat nelayan kita, maka peluang pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir perlu dilakukan dalam bentuk bantuan sarana penangkapan berupa tramel net.

Sejak diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 39/ Tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan jaring *trawl* atau pukat harimau disebagian besar wilayah Indonesia, kemudian muncul alat-alat penangkap ikan alternatif sebagai pengganti jaring *trawl*. Salah satu alat tangkap yang dimaksud adalah *Trammel Net* atau jaring tiga lapis.

Trammel Net dalam penggolongannya masih termasuk dalam jenis *gill net*. Jaring ini merupakan alat penangkap udang yang cukup efektif yang terdiri dari tiga lapis jaring. Di bagian dalam sebanyak satu lapis, ukuran matanya lebih kecil dan di bagian luar sebanyak dua lapis dengan ukuran mata lebih besar. Di bagian atasnya diikatkan pelampung, sedangkan di bagian bawahnya diikatkan pemberat. Dioperasikan di dasar perairan untuk menangkap udang *Penaeid*.

Keberhasilan *trammel net* untuk menangkap udang sudah terbukti cukup baik, hal ini dapat dilihat hampir diseluruh wilayah Indonesia yang perairannya cocok dengan habitat udang pasti ada penangkapan dengan menggunakan alat tangkap *trammel net*.

Trammel Net merupakan alat tangkap yang sesuai untuk diterapkan dan dikembangkan dikalangan nelayan skala kecil, karena alat ini mempunyai bentuk dan konstruksi yang sederhana dan harganya relatif terjangkau. Pengoperasiannya mudah dan dapat dioperasikan dengan perahu bermotor / tanpa motor berukuran kecil dengan nelayan sebanyak 2 – 3 orang. Namun demikian dapat juga diusahakan secara industri.

Agar *trammel net* tetap sebagai alat penangkap ikan (udang) yang ramah lingkungan, maka Petugas Perikanan Tangkap yang terkait harus tetap waspada dan tidak lengah dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) di lapangan. Untuk itu, disusunlah Kerangka Acuan Kerja ini guna memudahkan dan memperlancar tugas-tugas di lapangan.

1.3 **Tujuan**

Pengadaan bantuan tramel net ini dilaksanakan dengan tujuan :

a. Memperkuat teknologi dan sumberdaya manusia masyarakat pesisir khususnya nelayan melalui alat penangkap ikan, sehingga diharapkan terjadinya peningkatan produktivitas penangkapan ikan nelayan skala kecil (miskin) tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan masyarakat miskin di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat.

b. Memperkuat teknologi dan sumberdaya manusia masyarakat pesisir khususnya nelayan melalui pengembangan alat gerak (perahu), melalui motorisasi.

c. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap melalui Revitalisasi Alat penangkapan Ikan.

d. Mendorong pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) lainnya yang masih berbasiskan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

1.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Terbinanya usaha ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir/nelayan miskin yang tersebar di 4 Kabupaten wilayah pesisir, melalui pemberian bantuan alat penangkapan ikan Tramel Net sebanyak 166 unit.
2. Meningkatnya capaian pemanfaatan potensi sumberdaya ikan yang masih relatif besar, karena sampai saat ini potensi sumberdaya alan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas percepatan pemberdayaan masyarakat pesisir/nelayan untuk membangun dasar-dasar yang kuat dalam mencapai rumah tangga masyarakat pesisir/nelayan yang sejahtera.

1.4 Keluaran (Output)

Tersedianya alat bantu penangkapan ikan berupa Tramel Net sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) unit.

1.5 Hasil (*Outcome*) :

1. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta taraf hidup nelayan tradisional/miskin.

2. Pengurangan tingkat kemiskinan nelayan dan masyarakat wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Barat.
3. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya hasil penangkapan ikan di laut untuk kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Dasar Hukum.

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu ini dilaksanakan berdasarkan :

1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3) Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015, menetapkan arah kebijakan dan tahapan RPJMD diantaranya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui penyuluhan dan bimbingan teknis.
7) Program Kerja Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013.
8) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Belanja Pendapatan Nasional yang dialokasikan setiap tahunnya untuk mendukung Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

2.2. Lokasi Kegiatan.

Pengadaan Tramel Net ditujukan untuk 4 (empat) Kabupaten wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat, yakni :

1) Kabupaten Pasaman Barat
2) Kabupaten Agam
3) Kabupaten Padang Pariaman
4) Kabupaten Pesisir Selatan.

2.3 Pengadaan paket :

Jenis kegiatan : Pemberdayaan Desa Terpadu dalam bentuk Pengadaan trammel net sebanyak 166 unit siap operasional.

2.4 Distribusi alokasi paket:

Pengadaan Paket Bantuan Tramel Net untuk kegiatan Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) unit, dengan alokasi sebagai berikut :

- Kabupaten Pasaman Barat : 80 unit
- Kabupaten Agam : 16 unit
- Kabupaten Padang Pariaman : 20 unit
- Kabupaten Pesisir Selatan : 50 unit

Jumlah : 166 unit

Alokasi untuk masing-masing Kabupaten sesuai dengan proposal dan hasil identifikasi yang akan dilakukan sebelum dilaksanakan penyerahan paket bantuan.

Pertimbangan dalam memilih lokasi kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Nagari/Kelurahan/Desa yang berada di wilayah pesisir/pantai
2) Nelayan/Taruna Nelayan miskin yang bersedia dibina.
3) Terdapat potensi perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan
4) Penetapan nagari/kelurahan/desa serta calon penerima berdasarkan usulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilakukan Identifikasi dan Ferivikasi oleh petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
5) KK Miskin Penerima paket Bantuan ditetapkan (melalui Surat Keputusan) oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.

2.5. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu ini adalah sebagai berikut :

a. Persiapan administrasi/persuratan (TOR, Juklak dan Spesifikasi Teknis)
b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Paket Bantuan
c. Persuratan ke daerah Kabupaten/Kota
d. Penunjukan Tim Identifikasi (Penetapan Kepala Dinas)

e. Penyusunan Kuisioner Identifikasi (Draft)
    - Pengesahan Kuisioner Identifikasi (persetujuan atasan)
    - Perbanyakan Kuisioner
f. Identifikasi dan Verifikasi ke daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Pemberitahuan (persuratan) ke lokasi (Kab/Kota)
    - Pelaksanaan Identifikasi
g. Penyusunan SK Penunjukan Penerima Paket (Draft)
h. Pengesahan/Penetapan Penerima Paket Bantuan
i. Pengumuman lelang (Panitia)
j. Persiapan Administrasi Pelaksanaan Tender (Panitia)
k. Rapat persiapan pelaksanaan lelang. (Panitia)
l. Penjelasan Pekerjaan
m. Pengadaan Barang (paket bantuan)
n. Penyerahan Paket/barang ke daerah (Berita Acara Serah Terima)
    - Penyusunan Rencana/Waktu/Jadwal Penyerahan Barang
    - Koordinasi dengan Kabupaten/Kota Penerima Paket Bantuan
    - Pemberitahuan (persuratan) ke Kab/Kota.
o. Monitoring dan pembinaan
p. Laporan

Pembentukan Tim Identifikasi Tingkat Provinsi dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota membuat usulan calon penerima paket Trammel Net Tahun 2013 berdasarkan seleksi permohonan proposal dari nelayan yang berminat.

Tim Identifikasi Tingkat Provinsi yang ditunjuk bersama petugas Dinas Kabupaten/Kota melakukan Identifikasi terhadap nelayan calon penerima paket sesuai usulan Dinas Kabupaten Kabupaten / Kota terkait.

Hasil Identifikasi di lapangan dievaluasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Calon penerima paket bantuan yang telah di identifikasi, ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

2.6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

Jadwal pelaksanaan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku. Secara umum jadwal pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada daftar terlampir.

2.7. Proses

k. Pembentukan Tim Identifikasi Tingkat Provinsi dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

l. Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten / Kota membuat usulan calon penerima paket Trammel Net Tahun 2013.

m. Tim Identifikasi Tingkat Provinsi yang ditunjuk bersama petugas Dinas Kabupaten/Kota melakukan Identifikasi terhadap nelayan calon penerima paket sesuai usulan Dinas Kabupaten Kabupaten / Kota terkait.

n. Hasil Identifikasi di lapangan dievaluasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

o. Calon penerima paket yang telah lolos seleksi ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

2.8. Mekanisme Penerimaan Paket

- Penyedia barang menyerahkan paket yang disediakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Berita Acara Serah Terima Paket.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan paket yang telah disediakan ke Dinas Kelautan dan Perikanan berupa berita acara serah terima.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama penyedia barang (paket) menyerahkan ke masing - masing penerima melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota yang selanjutnya diteruskan kepada nelayan berdasarkan Surat Keputusan.

2.9. Penanggung Jawab Pengelola Paket

4. Penanggungjawab pengelolaan paket adalah penerima paket.
5. Penerima paket bertanggungjawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota terkait.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota bertanggung jawab terhadap pembinaan bagi keberlanjutan operasional paket yang telah diserahkan kepada nelayan di daerah binaannya.

III. MONITORING DAN PEMBINAAN

4.1. Monitoring

Kegiatan Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota mulai dari identifikasi, seleksi nelayan, penyerahan dan perkembangan bantuan pengadaan long tail ini.

4.2. Pembinaan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota melakukan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat.

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Desa Terpadu berupa pengadaan trammel net ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Program : Gerakan Terpadu Pensejahteraan Ekonomi Nelayan

Kegiatan : Pemberdayaan Desa Terpadu

Sub Kegiatan : Pengadaan Paket Bantuan Tramel Net Sebanyak 166 Unit

Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat 80 unit, Kab. Pesisir Selatan 50 unit, Kab.Padang Pariaman 20 Unit, dan Kab.Agam 16 unit.

Tabel 6.10 Rencana Anggaran Biaya Jaring Udang (Tramel Net) Masing-Masing Kabupaten

No	Spesifikasi Teknis	Volume	Jumlah
1.	• Jaring (webbing) : PA Multifilament D/2 dan D/6 MD 52 dan ML 70, MS 1" – 1 ¾" S 35 • Tali pelampung tanda : PE diameter 3 mm, pjg = 36 m • 72al iris atas : PE diameter 3 mm, pjg = 35 m • Tali Pelampung : PE diameter 3 mm, pjg = 36 m • Tali Pemberat : PE diameter 2,5 mm, pjg = 36 m • Tali Ris Bawah : PE diameter 2,5 mm, pjg = 35 m • Pelampung : Y 3 atau swallow F 401, 50 bh • Pelampung Tanda : Plastik kapsul, 2 bh, diameter 4 ", pjg = 30 cm • Pemberat : Timah Kaplsul, 130 bh • Tali Selambar : PE diameter 6 mm, pjg 25 m • Benang Pengikat : PA 210 D 6, 2 ikat	1 piece	515.500,-
	Jumlah		515.500,-
	PPn 10 %		51.550,-
	Jumlah 1 (satu) piece		567.050,-
	Jumlah 1 (satu) unit (10 piece x Rp.567.050)		5.670.500,-
	Jumlah total 166 unit (166 x 5.670.500)		**941.303.000,-**
	Dibulatkan Menjadi		**942.050.000,-**

(*sembilan ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).*

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Gerakan Terpadu Pensejahteraan Ekonomi Nelayan

Kegiatan : Pemberdayaan Desa Terpadu

Sub Kegiatan : Pengadaan Paket Bantuan Tramel Net Sebanyak 166 Unit

Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat 80 unit, Kab. Pesisir Selatan 50 unit, Kab.Padang

Pariaman 20 Unit, dan Kab.Agam 16 unit.

Tabel 6.11 Harga Perkiraan Sendiri Jaring Udang Masing-Masing Kabupaten

No	Spesifikasi Teknis	Volume	Jumlah
1.	• Jaring (webbing) : PA Multifilament D/2 dan D/6 MD 52 dan ML 70, MS 1" – 1 ¾" S 35 • Tali pelampung tanda : PE diameter 3 mm, pjg = 36 m • Tali ris atas : PE diameter 3 mm, pjg = 35 m • Tali Pelampung : PE diameter 3 mm, pjg = 36 m • Tali Pemberat : PE diameter 2,5 mm, pjg = 36 m • Tali Ris Bawah : PE diameter 2,5 mm, pjg = 35 m • Pelampung : Y 3 atau swallow F 401, 50 bh • Pelampung Tanda : Plastik kapsul, 2 bh, diameter 4 ", pjg = 30 cm • Pemberat : Timah Kaplsul, 130 bh • Tali Selambar : PE diameter 6 mm, pjg 25 m • Benang Pengikat : PA 210 D 6, 2 ikat	1 piece	515.000,-
	Jumlah		515.000,-
	PPn 10 %		51.500,-
	Jumlah 1 (satu) piece		566.500,-
	Jumlah 1 (satu) unit (10 piece x Rp.566.500)		5.665.000,-
	Jumlah total 166 unit (166 x 5.665.000)		**940.390.000,-**

(*Sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).*

Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa semaua prosedur telah dilakukan dalan upaya membantu masyarakat nelayan miskin untuk keluar dari kemiskinannya. Nelayan yang akan menerima paket bantuan haruslah termasuk dalam KK Miskin, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.12 JUMLAH KK MISKIN DI KAB/ KOTA WILAYAH PESISIR DATA BPS TAHUN 2008

No	Kab/Kota	Jumlah KK Miskin
1	Pesisir Selatan	1861
2	**Padang**	**1190**
3	Pariaman	129
4	Padang Pariaman	338
5	Agam	125
6	Pasaman Barat	1827
7	Kep .Mentawai	210
	JUMLAH	**5680**

Tabel 6.13 REALISASI PENERIMA PROGRAM GEPEMP TAHUN 2012

NO	KAB/KOTA	REALISASI (DKP)
1	Pesisir Selatan	366
2	**Padang**	**231**
3	Pariaman	57
4	Padang Pariaman	173
5	Agam	80
6	Pasaman Barat	510
7	Kep .Mentawai	55
	JUMLAH	**1472**

Tabel 6.14 Lokasi Sasaran Kota Padang

Tahun	Kecamatan	Kelurahan
2012	Lubuk Begalung Padang Selatan Koto Tangah Bungus Teluk Kabung Padang Barat	Kel. Gates Nan XX Air Manis Pasia nan Tigo Teluk Kabung Utara Purus
2013	- Padang Utara - Bungus Teluk Kabung	- Air Tawar barat - Bungus selatan - Teluk Kabung Tengah

Tabel 6. 15 Paket yang diserahkan pada tahun 2012 di Kota Padang

No	Bidang	Jenis Paket	Jumlah (unit)
1	Perikanan Tangkap	- Long Tail - Gill Net - Fish Box	15 10 50
2	Perikanan Budidaya	- Jaring Tancap	14
3	P2HP	- Fish Box -SPG Roda 3 - Etalase - Alat kerupuk - Lemari Asap - Depot Es - Alat Pendingin - Alat Bakso	110 1 5 1 5 1 2 1
4	KP3K	- Show Case	10

Tabel 6.16 Paket Gepemp tahun 2013 di Kota Padang :

No	Bidang	Jenis Paket	Jumlah
1	Perikanan Tangkap	- Long Tail - Gill Net - Perahu	36 unit 20 unit 25 unit
2	Perikanan Budidaya	- Lele terpal	10 unit
3	P2HP	- Sarana Perebusan teri - Sarana penjemuran - Gerobak Dorong	5 unit 2 unit 1 unit

TABEL 6.17 DAFTAR PENERIMA GEPEM TANGKAP 2013 DI KOTA PADANG

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Jenis Bantuan				Termasuk KK Miskin	Nilai Bantuan
				Long Tail	Gill Net	Tramel Net	Perahu		
	Kota Padang								
1	Antonius	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	1		9.400.000
2	Afrizal	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	1		9.400.000
3	Zainun	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	1		9.400.000
4	Edi Japang	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	1		9.400.000
5	Mawardi	Air Tawar Barat	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
6	Aidil	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
7	Nasril	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
8	Syamsudin	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
9	Ersurisman	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
10	Basril	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
11	Marseto	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
12	Syamsir Alam	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
13	Diman	Air Tawar Barat	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
14	Abdul Wahid	Rimbo Kaluang	Nelayan	1	0	0	1		3.400.000
15	Maizafri	Rimbo Kaluang	Nelayan	1	0	0	1		3.400.000
16	Afrizal.E	Rimbo Kaluang	Nelayan	1	0	0	1		3.400.000
17	Nasrul	Rimbo Kaluang	Nelayan	1	0	0	1		3.400.000
18	Yulius Efendi	Rimbo Kaluang	Nelayan	1	0	0	1		3.400.000
19	Aswardi	Rimbo Kaluang	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
20	Nazarudin	Rimbo Kaluang	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
21	Zainudin	Rimbo Kaluang	Nelayan	0	1	0	1		3.400.000
22	Maiyulis	Rimbo Kaluang	Nelayan	0	1	0	1		3.400.000
23	Muslim Gribo	Rimbo Kaluang	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
24	Anwar	Rimbo Kaluang	Nelayan	0	1	0	0		3.400.000

25	Syafril	Rimbo Kaluang	Nelayan	0	1	0	0		3.400.000
26	Rudy Chandra	Rimbo Kaluang	Nelayan	0	1	0	0		3.400.000
27	Irwan	Rimbo Kaluang	Nelayan	0	1	0	0		11.000.000
28	Asril	Bungus Selatan	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
29	Syafriman	Bungus Selatan	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
30	Ersal	Bungus Selatan	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
31	Adriyon	Bungus Selatan	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
32	Damli	Bungus Selatan	Nelayan	0	0	0	1		6.000.000
33	Jamilus	Bungus Selatan	Nelayan	1	1	0	0		14.400.000
34	Tasman	Bungus Selatan	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
35	Tarmizi	Bungus Selatan	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
36	Marten	Bungus Selatan	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
37	Syamsuardi	Bungus Selatan	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
38	Arman	Bungus Selatan	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
39	Damriadi	Bungus Selatan	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
40	Rinto	Bungus Selatan	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
41	Dadendi	Bungus Selatan	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
42	Hasan Basri	Bungus Selatan	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
43	Masra	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
44	Kasman	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
45	Sofian	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
46	Eri Efrizal	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
47	Ramlis	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
48	Jasril	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
49	Nofrizal	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
50	Bahrul	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	1	1	0	0		14.400.000
51	Prianggono	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	0	1	0	1		17.000.000
52	Safrianto	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000

53	Masynol	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
54	Zulkifli	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
55	Marlius	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	1	0	0	0		3.400.000
56	Jasril Cinggis	Tl.Kabung Tengah	Nelayan	0	0	0	1		6.000.000
	JUMLAH			36	20	0	25		412.400.000

Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pemberian bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur seperti gambaran yang telah dipaparkan diatas namun hal yang sama juga berlaku sebagaimana KKP kemukakan bahwa evaluasi terhadap paket-paket bantuan apakah berhasil atau tidak tidak dilakukan evaluasi. Hal ini terkesan bahwa setelah bantuan dilakukan selesailah tugas untuk penyaluran bantuan, tetapi bagaimana bantuan tersebut setelah diterima apakah nelayan meningkat pendapatannya atau tidak belum lagi dievaluasi terhadap masyarakat nelayan penerima bantuan. Berdasarkan wawancara dengan para nelayan penerima bantuan ditanyakan bahwa bagaimana alat bantuan dari Bapak Gubernur melalui DKP Provinsi, jawaban mereka masih banyak yang kurang seperti: panjangnya jaring yang kurang, mesin yang kurang kencang, perahu yang kurang panjang dan lebar. Secara umum bantuan memberikan manfaat terhadap kehidupannya.



Gambar: 6.4 wawancara dengan Kepala bidang Tangkap dan Kepala Seksi Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Walaupun ketimpangan di Sumatera Barat relatif rendah dibandingkan provinsi lain. Menurut Sugyarto (2016) mengemukakan bahwa Sumatera Barat termasuk salah satu daerah dari 10 provinsi dengan gini rasio terendah. Selanjutnya perubahan gini ratio lebih mudah dipahami dengan memperhatikan perubahan dustribusi pengeluaran pada semua kelompok penduduk. Tren gini rasio Sumatera Barat dan khsusunya daerah pedesaan sejalan dengan perubahan persentase penduduk miskin. Penurunan persentase penduduk miskin diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan. Kondisi tersebut didukung meningkatnya prporsi pengeluaran pada kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terbawah, ketika tingkat ketimpangan menurun. Sehingga dapat dikatakan penduduk pada status ekonomi terbawah dipedesaan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

6.6 Kebijakan Program Bantuan Kelautan dan Perikanan Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikan serta Kabid. Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Bapak Anton beserta staf, bahwa pemberian bantuan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, namun bantuan tersebut secara bertahap telah dilakukan, sebagian besar nelayan belum menerima bantuan tersebut disebabkan bantuan itu tidak sekaligus diberikan kepada nelayan miskin yang sesuai dengan yang daftar nelayan miskin yang ada di Kota Padang. Bantuan untuk nelayan miskin tersebut berasal dari dana APBN yang berasal dari dana aspirasi DPR pusat, sedangkan untuk dana APBD berasal dari propvinsi yang disebut Gepemp (Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Untuk dana yang berasal dari APBN yang berasal dari dana aspirasi DPR pusat pemerintah Kota Padang telah ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran bantuan. Dengan adanya pemotongan anggaran di pusat, calon penerima bantuan yang telah diidentifikasi, namun tidak jadi menerima bantuan yang mereka harapkan. Lebih lanjut Bapak Anton mengemukakan bahwa program-program tersebut tidak ada keberlanjutannya. Oleh karena itu banyak masyarakat nelayan miskin kecewa dengan cara kerja bantuan yang berasal dari pusat tersebut.

Untuk dana yang berasal dari APBD sebagaimana program Gubernur Sumatera Barat telah banyak nelayan miskin yang menerima bantuan, dan manfaat bantuan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat nelayan miskin, namun belum semua masyarakat menerima bantuan tersebut. Tercatat pada tahun 2012 dan 2013 telah digulirkan sebanyak 312 paket yang terdiri dari mesin long tail, gill net, dan perahu, serta 110 fish box.



Gambar: 6.5 Wawancara dengan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang beserta Staf dan kabid

Sehubungan dengan hasil kajian Sugiyarto (2016) mengemukakan bahwa pengentasan kemiskinan juga harus memperhatikan faktor tidak langsung (distand determinant) kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan dan budaya. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dengan target kelompok miskin, memungkinkan peningkatan produktivitas penduduk miskin dan mampu berkompetisi meraih kesempatan yang lebih baik. Begitu juga aspek budaya, banyak perilaku penduduk miskin yang menyebabkan sulit keluar dari kemiskinan, seperti sifat konsumtif dan tidak investasi untuk kebutuhan jangka panjang.

6.7 Peranan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan staf Pelabuahan Perikanan Samudera Bungus diperoleh informasi tentang keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah lama berdiri di Kota Padang, setelah pendiriannya semua kapal diwajibkan untuk mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Samudera Bungus. Semua hasil tangkapan dilakukan pelelangan ikan, maka pelabuhan samudera Bungus begitu ramai dikunjungi oleh para pedagang ikan dari berbagai daerah sehingga Pelabuhan Bungus sebagai pusat ekonomi wilayah pesisir Sumatera Barat. Pada Tahun 1992 terjadi konflik antara nelayan dan KUD Mina sehingga para nelayan tidak percaya kepada KUD Mina, maka para nelayan mendaratkan hasil tangkapan mereka ke Pelabuhan Muara Padang dimana tempat pendaratan ikan mereka bangun sendiri. Konflik ini terjadi disebabkan oleh dana yang dipungut kepada nelayan berupa retribusi tidak pernah dikembalikan kepada nelayan jika nelayan mengalami kecelakaan di laut. Pada hal di Pelabuhan Samudera Bungus semua sarana dan prasarana

pelabuhan cukup memadai seperti: doking kapal, es, BBM, air bersih, dan penyediaan bekal melaut. Pada tahun 1998 tidak ada lagi pelelangan di Pelabuhan Samudera Bungus. Pada tahun 2005 usaha untuk memindahkan para nelayan ke Pelabuhan Samudera Bungus dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan biaya pemindahan sebesar Rp. 55.000.000., namun upaya tersebut gagal dilakukan hingga saat ini.

Oleh karena itu Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tidak berfungsi secara optimal, aktifitas bingkar muat masih dilakukan oleh para nelayan yang memiliki kapal-kapal dengan ukuran 30 GT yang mereka berasal dari nelayan bungus sendiri, namun nelayan di Kota Padang tetap mendaratkan hasil tangkapannya di muara padang. Sekalipun pada saat ini pelabuhan bungus telah membangun kios sebanyak 30 unit, dalam upaya menyediakan sarana melaut seperti alat tangkap dan perbekalan untuk melaut. Namun dari 30 unit kios tersebut hanya beberapa kios saja yang beroperasi disebabkan tidak banyak nelayan yang menyinggahi pelabuahan tersebut. Oleh karena itu secara eksternal fungsi pelabuhan perikanan samudera bungus belum memberi manfaat secara penuh terhadap nelayan di Kota Padang.




Gambar : 6.6 Wawancara dengan Staf Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Padang

6.8 Peranan Perusahaan Perikanan (PT. Dempo)

Berdasarkan hasil wawancara dengan meneger dan staf di perusahaan perikanan PT. Dempo bahwa keberadaan perusahaan perikanan ini yang didirikan pada tahun 2007 belum membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat nelayan tradisional di Kota Padang khususnya. Hal ini disebabkan PT. Dempo tidak pernah membeli hasil tangkapan dari nelayan tradisional. Salah satu alasan mereka adalah : PT. Dempo hanya melakukan ekspor ikan tuna ke Jepang dan Amerika. Sekalipun mereka juga memproduksi ikan olahan berupa nuged, bakso ikan, risoles, steak, otak-otak, serta daging ikan

tuna. Semua produk yang mereka hasilkan tetap berhubungan dengan ikan tuna, sehingga mereka tidak pernah membeli ikan jenis lain selain ikan tuna. PT. Dempo juga membeli ikan tuna dari para nelayan dengan standar mutu yang telah mereka tetapkan, khususnya ikan tuna dari alat tangkap pancing tonda. Pada tahun 2008 PT. Dempo telah melakukan pembinaan terhadap masyarakat nelayan dalam upaya membeli hasil tangkapan mereka, namun respon nelayan tidak seperti yang diharapkan.

Menurut meneger perhari mereka memerlukan 15 ton ikan tuna segar, bahan baku ikan tuna ini tidak pernah terpenuhi, terpenuhi hanya 15 ton per minggu. 10 persen dari ikan tuna ini dipasok dari Provinsi Bengkulu tepatnya di Kabupaten Kaul dengan harga per kilogram berkisar antara Rp. 6.000-Rp. 9.000,- dengan berat ikan tuna per ekor rata-rata 50 kg. Menurut maneger stok ikan tuna di PT. Dempo minimal 60 ton, namun hingga saat ini belum terpenuhi, hal ini merupakan peluang bagi masyarakat nelayan di Kota Padang, namun hal ini tidak di lakukan oleh nelayan Kota Padang. Yang mampu memanfaatkan adalah nelayan Bengkulu yang mereka menangkap ikan tuna di Kepulauan Enggano. Rata-rata penghasilan mereka untuk satu kali penangkapan dapat mencapai Rp. 10.000.000,-.Wawancara ini di tutup dengan pernyataan bahwa kedepan kami juga akan membeli hasil tangkapan nelayan tradisional. Lebih lanjut meneger menjelaskan bahwa tawaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengelola kapal inka mina yang khusus menangkap ikan tuna. Hal ini ditolak oleh PT. Dempo dengan alasan biaya operasi yang besar dan kondisi kapal yang tidak nyaman bila gelombang besar.



Gambar: 6.7 Wawancara dengan menejer dan staf PT. Dempo Kota Padang

6.9 Peranan Pusat Pendaratan ikan dan Pelelangan Ikan

TPI batang arau terletak di muara Kota Padang dengan kapasitas produksi yang di daratkan nelayan tradisional per hari ± 7 ton. Menurut keterangan pengelola TPI Bapak wan, edi, dan anis, TPI ini dikelola secara pribadi dengan anggota nelayan yang mereka miliki masing-masing. Menurut keterangan mereka jika alat tangkap bagan tidak ber operasi, maka nelayan tradisional meningkat hasil tangkapannya. Peningkatan hasil tangkapan sangat ditentukan oleh musim penangkapan. Berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh nelayan ke pengelola TPI, hal ini juga yang menyebabkan nelayan tidak mau beralih ke Pelabuahan Nusantara Bungus. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TPI dari segi harga jual nelayan memperoleh harga yang wajar di muara Kota Padang tersebut, hal ini disebabkan banyak pedagang yang datang dari berbagai pasar yang ada di Kota Padang, umumnya jenis ikan yang mereka jual adalah : udang, ikan tongkol, tuna kecil, kembung dll.

Jika kita tanyakan kepada pedagang ikan dari segi biaya jauh lebih murah di muara jika dibandingkan dengan mereka membeli ikan di Pelabuhan Nusantara Bungus. Jika dilihat dari fasilitas yang ada seperti kemudahan transportasi cukup mudah dijangkau. Selanjutnya wawancara dengan TPI KUD Mina Gates dengan kapasitas produksi yang dilelang ± 30 ton/hari. KUD Mina Gates dikelola oleh Koperasi dengan beranggotakan 110 orang anggota. Simpanan wajib anggota adalah Rp. 100.000,- dan sumbangan sukarela Rp. 10.000,-. Jumlah agen yang terlibat di TPI KUD Gates ini sebanyak 10 orang. Pemasaran ikan dari TPI KUD Gates ini sampai ke luar daerah seperti: Jambi, Pekanbaru, dan Pariaman, Padang Panjang, dan Payakumbuh. Namun kelemahan dari TPI KUD Mina Gates ini adalah tidak adanya fasilitas Cold Storage, ES batang, parkir yang terbatas. Lingkungan TPI ini sangat kotor dan penuh dengan sampah di sekitar TPI KUD Mina Gates. Peran TPI sangatlah fital bagi masyarakat nelayan dan dari segi manfaat sangat bermanfaat, namun fasilitas tidak memadai dari segi luas, dan sarana pendukung lainnya yang terbatas.

Sangat eronis TPI Muara Anai dibangun dengan dana 30 Milyar, dengan fasilitas yang sangat lengkap dengan pabrik esnya dengan omset 2,5 milyar/tahun. Namun manfaatnya bagi nelayan tidak dapat dirasakan, hal ini disebabkan fasilitas tersebut tidak dapat dilalui oleh kapal dan perahu nelayan disebabkan pendangkalan muara anai tersebut. TPI sepi dan tidak ada aktifitas nelayan di TPI tersebut sekalipun didanai oleh dana APBN.






















KUD MINA "GATES"
BH: No.619 a/BH-XII/12-67
JL. MAKASAR No.8 Ps.GAUNG
KEC. LB. BEGALUNG
KOTAMADYA PADANG





Gambar : 6.8 Wawancara di Pusat Pelelangan ikan dan Pendaratan Ikan

6.10 Peranan Eksportir ikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan eksportir mengemukakan bahwa ada beberapa komoditi yang di ekspor ke singapore seperti: tripang, lobster, dan kepiting. Cara eksportir memperoleh komoditi tersebut adalah nelayan langsung yang mengantarkan kepada eksportir. Berdasarkan peraturan menteri perikanan dan kelautan No. 1/PERMEN-KP/2015 bahwa ekspor hasil tersebut harus memenuhi ukuran yang telah ditentukan. Lobster tidak boleh di ekspor dalam keadaan bertelur, berat lobster yang boleh di ekspor minimal memiliki berat 0,5 kg/ekor. Hal yang sama juga berlaku untuk kepiting. Untuk lobster dan kepiting harga per kilogram dibeli oleh eksportir adalah Rp. 250.000/kg, dan untuk teripang dibeli dengan harga Rp. 1.250.000/kg. Dalam proses pengiriman harus melalui karantina di bandara Internasional Minang Kabau, untuk komoditi lobster dan kepiting proses di karantina memerlukan waktu 4 hari, dan teripang memerlukan waktu 14 hari di karantina. Keluhan eksportir dalam mengekspor lobster dan kepiting adalah: setelah komoditi siap di ekspor dan telah melalui karantina, namun setelah sampai di bandara disuruh bongkar kembali, hal ini yang menyebabkan keluhan dari para eksportir. Hal ini akan menghambat dan menurunkan kualitas ekspor mereka untuk sampai di tujuan. Eksportir berharap bahwa proses tersebut jang terlalu lama karena pengiriman barang sudah sering dilakukan. Para eksportir meminta waktu karantina di persingkat sehingga produk lebih baik kualitasnya. Oleh karena itu hasil wawancara ini menggambarkan bahwa peran eksportir sangat diharapkan kedepan. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah diharapkan kedepan akan tumbuh eksportir-eksportir baru yang lebih besar dan dengan jumlah komoditi yang lebih beragam.



Gambar:6.9 Wawancara dengan eksportir ikan di Kota Padang

6.11 Peran restoran dan Rumah Makan

Peran restoran dan rumah makan dalam menyerap hasil tangkapan nelayan tradisional di Kota Padang sangatlah diharapkan oleh para nelayan. Tumbuhnya gerai-gerai makanan yang menawarkan ikan segar sangat diminati oleh masyarakat pada umunya. Khusus untuk masyarakat Kota Padang sudah akrab dengan warung-warung makan “lauk pukek” yang uaca yang tidatumbuh dan berkembang di kawasan wilayah pesisir Kota Padang, seperti Lauk Pukek Mak Apuak, Lauk pukek Supik, warung Lauk Pukek Palanta Bundo dan lainnya. Sementara untuk kawasan wisata Pantai Padang tumbuh restoran-restoran yang menawarkan ikan bakar yang diperoleh dari nelayan pancing seperti : Ikan Bakar Fuja, Unang Rindu, Pondok Ikan Bakar, Rumah makan ampera 99 dll. Semua ini merupakan prospek yang sangat baik untuk berkembangnya wisata kuliner di Kota Padang. Rata-rata restoran dan rumah makan ini telah memiliki nelayan pencari ikan sebagai langganan untuk memperoleh bahan baku untuk restoran dan rumah makan mereka. Persoalan yang timbul bagi rumah makan dan restoran

ini adalah jika tidak musim ikan dan adanya cuaca yang kurang baik atau badai, maka usaha mereka juga terkendala. Pada saat tidak musim ikan bahan baku untuk warung dan rumah makan menjadi mahal. Sementara harga jual tidak mengalami kenaikan. Untuk restoran di kawasan Pantai Padang kandang-kandang memperoleh bahan baku ikan bakar dari kepulauan mentawai. Secara umum dapat digambarkan bahwa peran restoran dan rumah makan ini sangat membantu para nelayan dalam pemasaran hasil tangkapan mereka.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada di kawasan pesisir agar tetap lestari, untuk itu upaya menjaga lingkungan perairan agar tetap terjaga dari bahaya bahan-bahan berbahaya perlu dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama. Khusus untuk lauk pukek masyarakat dihimbau agar tidak lagi menggunakan plastik kantong dalam berbelanja. Pencemaran lingkungan yang banyak terjadi saat ini adalah sampah plastik yang hanyut diwaktu hujan dan dibawa kelaut melaui sungai-sungai yang ada di Kota Padang.

















Gambar: 6.10 Wawancara dengan pengelola warung Lauk Pukek dan restoran di Kota Padang

6.12 Peranan UKM perikanan

Peranan UKM perikanan dalam upaya mempercepat proses transaksi hasil perikanan melalui proses pengolahan telah dilakukan oleh para wanita-wanita nelayan, melalui kelompok pengolah yang ada di masing-masing wilayah pesisir di Kota Padang. Terdapat beberapa pusat pengolahan di Kota Padang dengan beraneka macam jenis produk yang dihasilkan. Pada umumnya mereka bekerja perkelompok sesuai dengan produk-produk khas mereka seperti terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6.18 Kelompok Pengolah Ikan Kota Padang

No.	Nama Kelompok	Jenis Produk	Alamat
1	Poklahsar Lebon	Rendang ikan, Maco tuna badarai, abon ikan	Filano
2	Poklahsar Makmur Abadi	Rendang Ikan, Abon ikan, Roti Abon, Kerupuk Ikan	Mato Aia Padang Selatan
3	Poklahsar Bunga Bangsa	Abon Ikan, Selai Rumput laut	Bungus
4	Poklahsar Crysantium	Sala Lauk, Piciak, Rendang Tuna	Alang Laweh
5	Poklahsar Sinar Keluarga	Lele Kering	Kuranji
6	SP3N Koto Tangah	Abon Ikan, Kerupuk Maco, Sala Lauk, Palai Bada	Koto Tangah
7	Poklahsar Fagha Mitra Mandiri	Abon Ikan, Pangsit, Stick Tuna	Pasie Nan Tigo

Sumber: DKP Kota Padang.

Permasalah yang timbul dibidang pengolahan ini adalah kontinuitas bahan baku yang selalu kekurangan. Hal ini disebabkan oleh musim ikan yang selalu berfluktuasi. Permintaan dari konsumen

cukup tinggi dibidang pengolahan ini, namun terkendala oleh bahan baku yang kurang. Sumber bahan baku berasal dari hasil tangkapan bagan, payang, dan pukat tepi. Dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap pengolahan hasil perikanan sangat tinggi sehingga outlet untuk pemasaran telah disediakan, begitu juga pakaging dan lebeling dari produk olahan telah disediakan. Diharapkan kedepan pengolahan hasil perikanan semakin tinggi, khususnya permintaan dari luar provinsi disebabkan cita rasanya yang enak dan penuh gizi. Contoh produk dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: 6.11 Produk olahan UKM di Kota Padang

Upaya pemerintah melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan telah membangunan pusat UKM di Pasie Nan Tigo, fasilitas ini dapat berjalan jika saat musim ikan, jika tidak musim maka fasilitas ini tidak berjalan. Seperti terlihat pada gambar berikut:





Gambar: 6.12 Pusat Pengolahan UKM di Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah

Hapsari, Hakim, dan Soeaidy (2014) dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) berperan penting dalam perekonomian daerah khususnya dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini didasarkan pada kenyataannya bahwa, disatu pihak jika jumlah pengangguran meningkat mengikuti jumlah pertambahan penduduk tiap tahunnya, maka harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang mendukung, seperti UKM. Jenis UKM yang relatif padat karya, sehingga memungkinkan membantu penyerapan tenaga kerja yang tidak terserap. Dari potensi alam yang mendukung Kota Batu memiliki kriteria untuk penumbuhan iklim usaha UKM. Dari hasil analisa yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor Modal dan Laba UKM yang secara langsung dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Batu.

6.13 Peran Lembaga Perguruan Tinggi

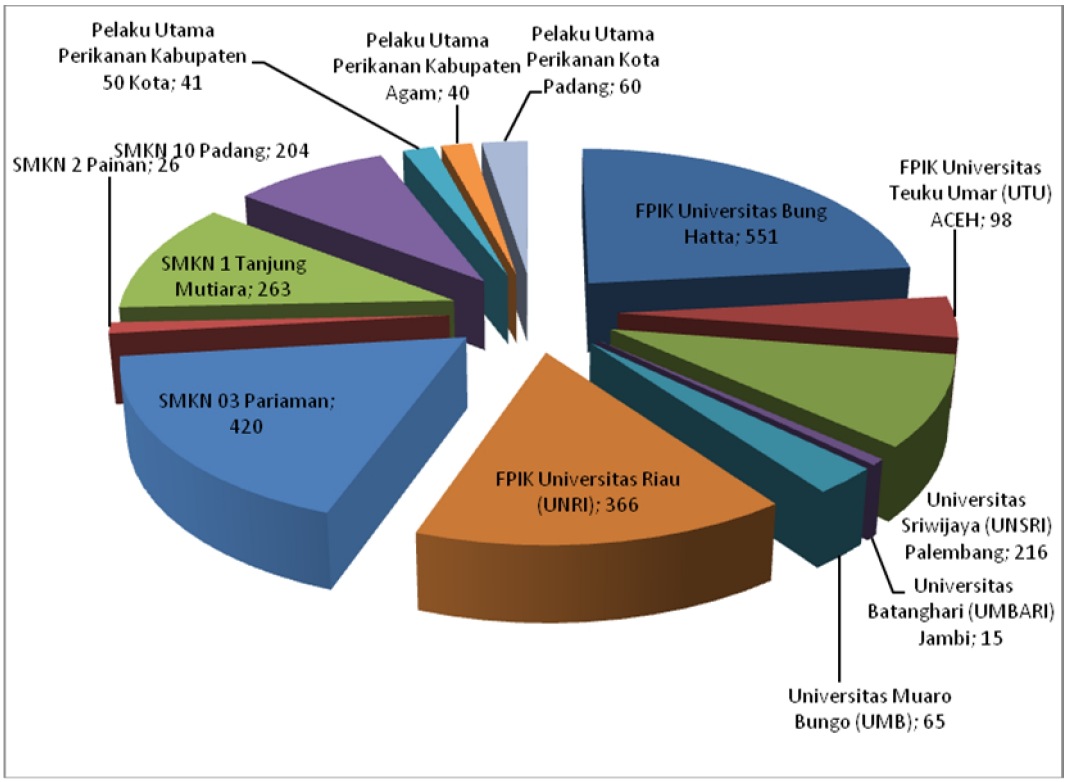
Peran lembaga perguruan tinggi selama ini belum dirasakan oleh masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan kurangnya dana dari perguruan tinggi dibidang PKM, dengan berjalannya waktu dana dari perguruan tinggi dan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terus meningkat, terlebih lagi dengan bergantinya lembaga pendidikan tinggi menjadi Menristek Dikti, maka geliat tersebut dirasakan oleh para akademisi. Pendidikan tinggi di Kota Padang yang memiliki Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan adalah Universitas Bung Hatta. Universitas Bung Hatta sejak berdirinya pada tahun 1982 dengan jumlah alumni ± 2.000 orang. Perjalan waktu terus berlangsung sehingga Bung Hatta terus berbenah diri dengan menghasilkan sarjana perikanan yang telah mengaplikasikan ilmu di berbagai bidang dan telah menyebar di wilayah Nusantara. Pada saat ini Fakultas Perikanan telah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi sehingga para lulusannya dapat bekerja sesuai kopetensi yang dimiliki. Dengan perubahan kurikulum tersebut maka, Fakultas Perikanan telah mengacu kepada SKKNI dan LSP-KP telah menunjuk Fakultas Perikanan sebagai TUK (Tempat Uji Kompetensi untuk

wilayah Sumatera), dan baru-baru ini telah berhasil sebagai TUK terbaik tingkat Nasional. Upaya-upaya tersebut baru dapat dirasakan oleh masyarakat dengan telah melakukan uji kompetensi terhadap mahasiswa dan para pelaku perikanan seperti: nelayan, pengolah, dan penyuluh perikanan. Untuk lebih jelasnya peranan perguruan tinggi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.19 Jumlah Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Univ. Bung Hatta
Tahun 2014 – 2016 Per Instansi

No	Lembaga	Jumlah
1	FPIK Universitas Bung Hatta	551
2	FPIK Universitas Teuku Umar (UTU) ACEH	98
3	Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang	216
4	Universitas Batanghari (UMBARI) Jambi	15
5	Universitas Muaro Bungo (UMB)	65
6	FPIK Universitas Riau (UNRI)	366
7	SMKN 03 Pariaman	420
8	SMKN 2 Painan	26
9	SMKN 1 Tanjung Mutiara	263
10	SMKN 10 Padang	204
11	Pelaku Utama Perikanan Kabupaten 50 Kota	41
12	Pelaku Utama Perikanan Kabupaten Agam	40
13	Pelaku Utama Perikanan Kota Padang	60
Jumlah		2365

Untuk lebih jelasnya seperti terlihat pada gambar berikut:



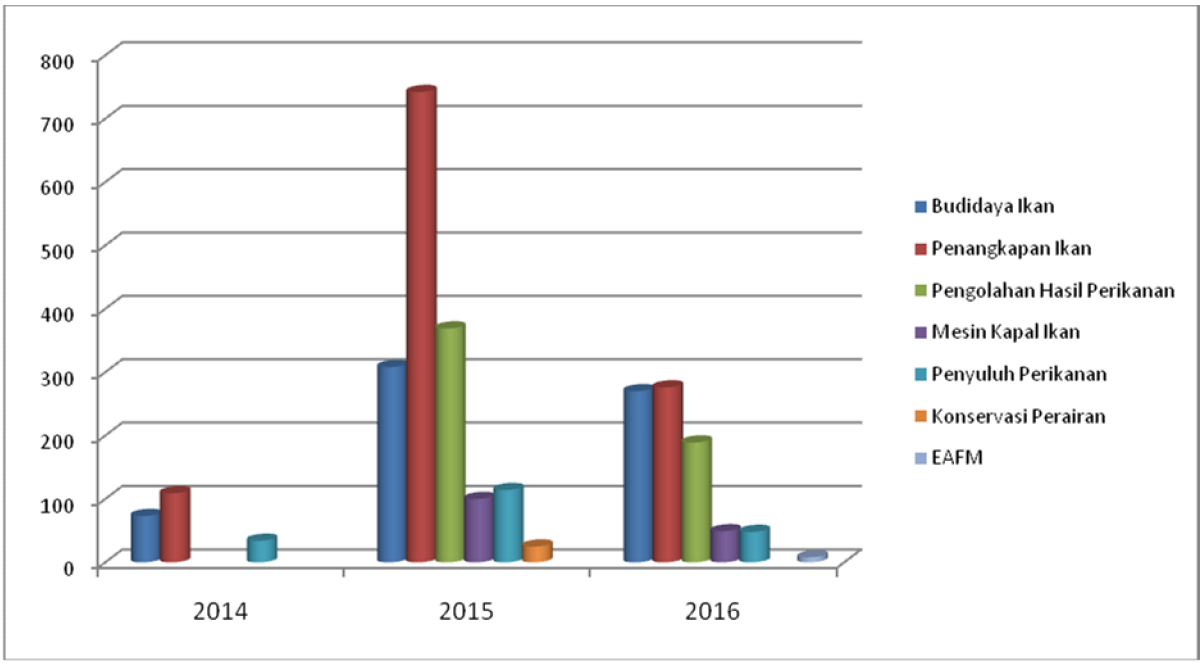
Gambar: 6.13 Peserta Uji Kompetensi per Instansi

Untuk peserta yang berasal dari Universitas Bung Hatta dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.20 Jumlah Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Univ. Bung Hatta
Tahun 2014 - 2016 Per Bidang

No.	Bidang	2014	2015	2016	Jumlah
1	Budidaya Ikan	73	308	270	651
2	Penangkapan Ikan	109	742	276	1127
3	Pengolahan Hasil Perikanan		369	189	558
4	Mesin Kapal Ikan		100	49	149
5	Penyuluh Perikanan	34	114	48	196
6	Konservasi Perairan		25		25
7	EAFM			8	8
Jumlah		216	1658	840	2714

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar : 6.14 Peserta Uji Kompetensi di TUK FPIK Bung Hatta

Upaya ini terus dilanjutkan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, dan pada saat in LSP-KP telah mempercayai TUK FPIK untuk menguji mahasiswa dan instansi lain termasuk siswa SMK kelautan dengan jumlah 1600 orang, dan pada saat sedang berlangsung di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta.

Menurut Dahlan (2016) mengemukakan bahwa tanggung jawab Perguruan Tinggi sesuai dengan Pasal 2 Bab II Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa tujuan Pendidikan Tinggi *pertama*, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian. *Kedua*, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi berkewajiban membekali mahasiswanya dengan seperangkat kurikulum, yang memungkinkan mereka memiliki sejumlah kompetensi. Apa yang telah dikemukakan oleh Dahlan ternyata Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta telah melaksanakan hal tersebut, sehingga memperoleh juara pertama TUK se Indonesia.

Lebih lanjut Suhaedy (2016) mengemukakan bahwa laut adalah masa depan bangsa. Pengelolaan laut dengan prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dapat mengantarkan Indonesia pada kejayaan bahari seperti masa lalu. Dibantu dengan kebijakan yang tepat, anak-anak

pelaku utama sektor perikanan, seperti nelayan, petambak, dan pembuat garam, akan mudah mengakses pendidikan vokasi di jenjang menengah dan tinggi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan bisa terjadi di kalangan warga pesisir yang umumnya miskin.

Dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia Susi Pudjiastuti (2016) Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia mengemukakan bahwa Lulusan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) jakarta dapat membangun Industri di dalam negeri untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pesan saya adalah kata ibuk menteri sejauh-jauh anda keluar negeri, lebih baik kalian dalam negeri. Bangun Perikanan di dalam negeri dalam acara pelantikan 476 wisudawan STP Tahun Akademik 2015/2016 di Jakarta. Di dalam dunia kerja selain pendidikan dibutuhkan dua hal penting yang dapat menunjang seseorang di dunia kerja, yaitu kejujuran dan kedisplinan. Selain itu, diperlukan pula sikap yang pantang menyerah untuk menumbuhkan dua hal penting tersebut. Susi menegaskan, sebagai negara yang besar, sudah seharusnya Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Kedaulatan bukan sekedar keamanan sebuah negara, tapi sektor kelautan dan perikanan adalah pilar ekonomi yang wajib kita kuasai. Kita harus mandiri serta terbebas dari negara manapun.

Lebih lanjut Mawangi (2016) mengemukakan bahwa problem lain yang dimiliki kampus agaknya terletak pada kurangnya penghayatan atas makna kewajiban mengabdi untuk masyarakat. Pasalnya, banyak kampus justru memilih mengejar status internasional atau nilai akreditasi terbaik. Pada hal, universitas berkewajiban peduli masalah bangsa, bukan melulu mengejar status kampus bertaraf internasional kata Riris K. Sarumpaet Guru besar FIB UI. Urgensi penelitian adalah menyelesaikan masalah di masyarakat, sehingga cukup aneh jika ada universitas yang tak menjalankan kewajiban tersebut. Universitas perlu menjamin bahwa temuan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat digunakan pemerintah serta masyarakat, misalnya saja membantu proses pembuatan kebijakan.

6.14 Model Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Ditinjau dari Perspektif Multi Dimensi di Kota Padang

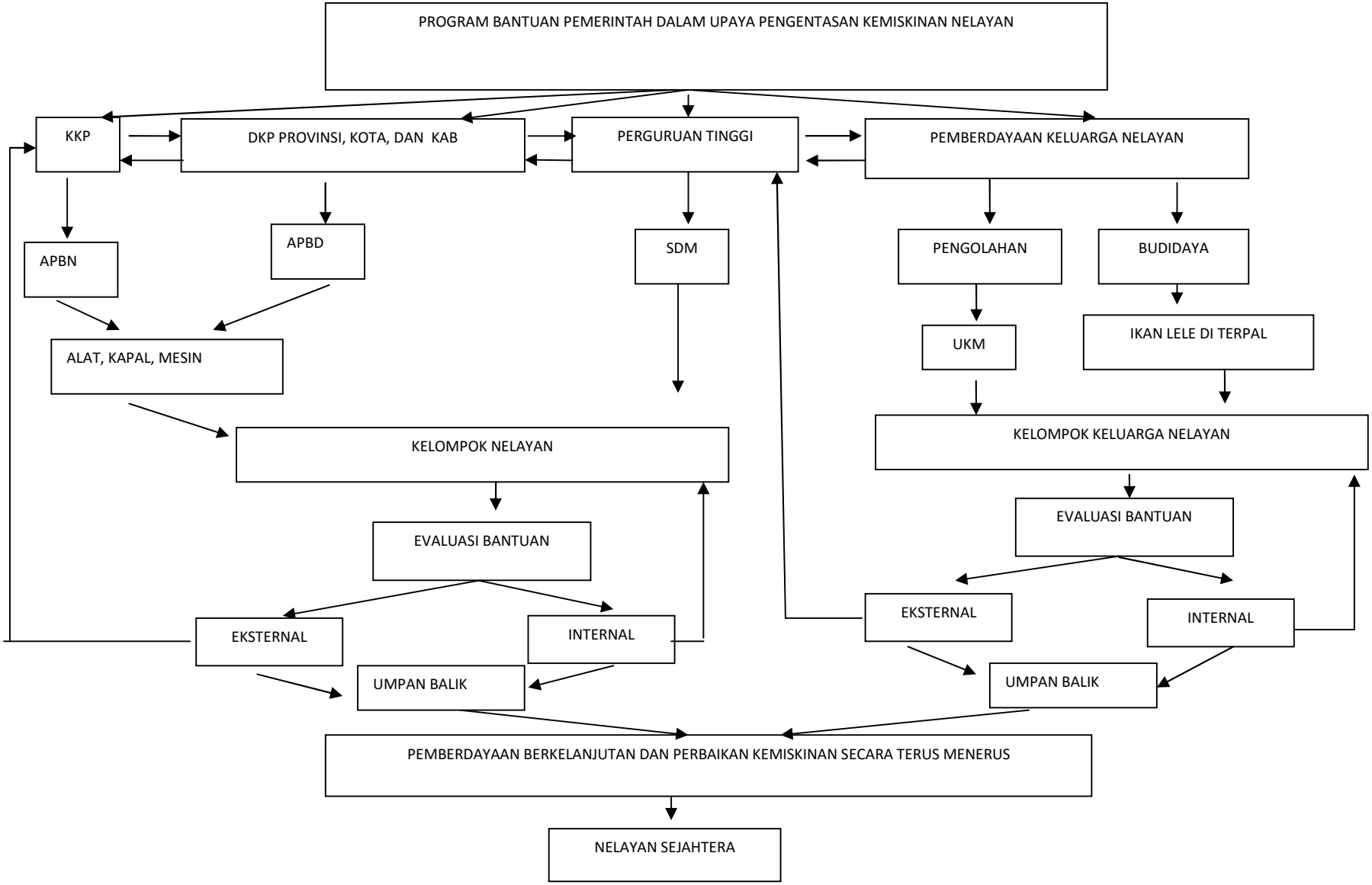
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh model Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Ditinjau dari Perspektif Multi Dimensi di Kota Padang, seperti terlihat pada bagan di bawah ini.

Dari bagan di bawah yang paling penting dilakukan adalah evaluasi bantuan sebelum dan sesudah diberikan tidak pernah dilakukan pemerintah. Oleh karena itu perlu kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam upaya mengentasakan kemiskinan

masyarakat nelayan di Kota Padang. Kerjasama selama ini terbatas pada kebutuhan akan pekerjaan-pekerjaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bentuk proyek-proyek kajian. Kajian tentang uapaya-upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi masih kurang. Kita juga patut berterimakasih kepada Menristek Dikti dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan masyarakat melalui ibah PKM-PKM di perguruan tinggi yang aplikatif untuk masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang harus dikejar dalam upaya percepatan pengurangan masyarakat miskin di Indonesia.

Evaluasi berikutnya adalah bagaimana dana yang diberikan kepada masyarakat nelayan dalam bentuk bantuan alat tangkap, mesin, dan kapal terlebih dahulu dilakukan identivikasi kelapangan apakah bantuan tersebut sudah sesuai dengan kondisi lapangan seperti: jenis perairan, lingkungan perairan, kondisi topografi lautan, oceanografi, serta keinginan masyarakat terhadap yang dibutuhkan terhadap bantuan tersebut. Jika tidak dilakukan maka akan terjadi pemubaziran bantuan karena tidak sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Kedepan juga diharapkan bahwa bantuan dari dana pusat yang bersumber dari APBN dan DAK tidak mengalami perobahan sehingga koordinasi antara pusat dan daerah menjadi solid. Kekecewaan masyarakat kadang-kadang timbul disebabkan kurangnya komunikasi antara pusat dan daerah masalah bantuan sehingga jumlah yang direncanakan berubah secara mendadak baik dalam bentuk jumlah dan besarannya.

Untuk bantuan yang berasal dari APBD Provinsi, Kota, dan Kabupaten telah berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil pengamatan dilapangan telah terlihat secara transparan mulai dari penganggaran, pembelian, sampai kepada pelaporan sudah sesuai sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.



Gambar 6.15: Model strategi pengentasan kemiskinan nelayan ditinjau dari perspektif multi dimensi di Kota Padang

Persoalan timbul jika masyarakat penerima bantuan lebih besar dari paket-paket yang akan diberikan. Oleh karena itu kedepan diharapkan bantuan-bantuan tersebut benar-benar berkelanjutan sesuai dengan terget pemerintah daerah masing-masing. Semoga upaya-upaya yang telah berjalan ini secara nyata dapat merubah pola pikir masyarakat di kawasan pesisir terhadap bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kita berharap kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dan pusat saling besinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan nelayan di Kota Padang khususnya dan dikota-kota lain umumnya.

Tahap berikutnya adalah bagaimana upaya memberdayakan keluarga nelayan dalam upaya meningkatkan pendapatannya, dua faktor yang sangat menonjol disini yaitu: bidang pengolahan dan usaha budidaya ikan lele dengan terpal. Di Kota padang upaya ini cukup berhasil sehingga pemerintah membangun UKM pengolahan dengan dana 20 Milyar yang berpusat di Pasir Sebelah Kecamatan Koto Tangah dan usaha budidaya ikan lele dengan terpal melalui kelompok-kelompok wanita nelayan. Persoalan pemasaran tidak ada kendala disebabkan adanya upaya-upaya pengolahan ikan lele, berupa lele asap yang harganya lebih tinggi dari lele segar. Oleh karena itu model ini menurut peneliti cukup berhasil di Kota Padang.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Bantuan untuk nelayan berupa alat tangkap, perahu, dan mesin terus dilanjutkan agar jumlah nelayan miskin dapat dikurangkan.
2. Bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD jangan dipotong sehingga jumlah penerima dapat ditingkatkan
3. Perlu dilakukan evaluasi setelah bantuan tersebut digulirkan sehingga dampak bantuan dapat terlihat
4. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus perlu ditingkat, baik dari segi pelayan dan jasa lainnya.
5. Diharapkan PT. Dempo kedepan dapat membeli hasil tangkapan nelayan tradisional untuk diolah menjadi produk lokal seperti: Nuget, stick, bakso, risoles, dan otak-otak.
6. Infrastruktur TPI perlu dilengkapi untuk kebutuhan nelayan dalam menangani ikan hasil tangkapan mereka, fasilitas parkir, dan cold storage, serta kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan.
7. Perlu dilakukan evaluasi sistem ekspor agar dapat prosesnya lebih cepat dengan menggunakan teknologi yang lebih baik, sehingga proses pengiriman dapat lebih cepat
8. Peningkatan kualitas restoran dan rumah makan dari segi mutu makanan dan keanekaragaman menu terus dilakukan agar menjadi pusat wisata kuliner Kota Padang
9. Kekurangan bahan baku untuk produk pengolahan dapat dilakukan dengan cara peningkatan jumlah alat tangkap, kualitas lingkungan dan sumberdaya dengan menjaga dari sampah dan zat berbahaya lainnya.
10. Peran perguruan tinggi terus ditingkatkan dengan kerjasama LSP-KP untuk memberikan pendaping ijazah berupa sertifikat kompetensi bagi mahasiswa, siswa, masyarakat, dan penyuluh perikanan.

7.2 Saran

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun sitem monitoring dan evaluasi bantuan dan program yang diberikan
2. Pelabuhan perlu membangun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) dan air bersih
3. TPI dan PPI perlu ditingkatkan infrastruktur untuk menunjang aktifitas bongkar dan muat hasil tangkapan

4. TPI dan PPI yang belum berfungsi disebabkan pendangkalan agar segera dilakukan pengerukan dalam rangka melancarankan arus masuk dan keluar kapal dan perahu
5. Membangun sistem pelayanan yang baku agar proses ekspor dapat lebih cepat

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2013. Pembangunan Ekonomi Maritim. Jakarta: Graha Ilmu.

Agunggunanto, EY (2011) Analisis Kemiskinan Nelayan dan Pendapatan Keluarga nelayan Kasus di Kecamatan Wedung Kab. Demak, Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Juli 2011, Volume 1, Nomor 1.

Ahmed, A. U., and S. Neelormi. 2008. The Impacts of Climate Change on Marine Socio-ecological Systems: The Plight of Coastal Fisherfolk Communities in Bangladesh. Article presented at Coping with global change in marine social-ecological systems. 8- 11. Rome FAO.

Akbarini, T.U, Gumilar, I, dan Grandiosa, R (2012) Kontribusi Ekonomi Produktif Wanita Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga Nelayan di Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Jurnal Perikanan dan Kelutan. Vol, 3, No.3 September 2012, 127-136.

Alkire, S. & J. Foster. (2008). *Counting and Multidimensional Poverty Measurement.* Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) Working Article Number 7.

Ariyanti dan Santoso (2015) Analisis Kemiskinan Nelayan Perikanan Tangkap Di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Arsyad. A (2007). Analisis Sistem Pengelolaan Perikanan Artisinal Berkelanjutan (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Abang Kecamatan Galang, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau). Disertasi Pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Béné, C. (2003). When fishery rhymes with poverty: A first step beyond the old paradigm on poverty in small-scale fisheries. *World Development,* 31(6), 949-975. 39

Dahlan, F.Z (2016). Wisuda dan Pengangguran. Padang Ekspres Rabu, 30 Maret 2016.

De Janvry, A, and Sadoulet, A (2000). Rural poverty in Latin America: Determinants and exit Paths. " Food Policy 25 (4): 389-409.

Dikrurahman dan Sofhani,TF (2015) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kelompok Nelayan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Kelompok Nelayan Di Pulau Temoyong, Kecamatan Bulang, Kota Batam): Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N1.

Elfindri (2002). Ekonomi Patron-Client: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro. Padang Andalas University Press.

…….(2007) Evaluasi Program Penangulangan Kemiskinan: Desain dan Implementasi. Jurnal Ipteks Terapan. Vol 1, No. 3 Desember 2007. 1-18.

Elfindri dan Saputra, W (2005), Kemiskinan dan Startegi Penyesuaian: Studi Empiris Sumatera Barat dengan Data Susenas 1999 dan 2003, Jurnal Ekonomi Indonesia No.2 Desember 2005.

Ellis, F. (2000). Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. Oxford, Oxford University Press.

Fajriadi et al, (2013) Probabilitas Kemiskinan Nelayan di Kota Banda Aceh. Jurnal Imu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No.1, Februari, 2013.

Hasanuddin, N.L, Noor, N, Santosa, H.R .2013. Is it possible to eradicate poverty in the fishermen village ? Laboratory for Housing and Human Settlement, Department of Architecture, ITS. international journal of environmental sciences volume 4, no 2, 2013.

Hapsari, PP, Hakim, A, dan Soeaidy, S (2014) Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintahan Kota Batu). Wacana-Vol. 17 N0. 2.

Hariansyah, R. 2013. strategi rumah tangga nelayan dalam mengatasi kemiskinan (studi nelayan miskin di desa lubuk kecamatan kundur kabupaten karimun) Tanjung Pinang.

Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (2003). Active interviewing. In J. F. Gubrium & J. A. Holstein (Eds.). *Postmodern Interviewing.* London: Sage.

Hyatt, S. B. (2001). From citizen to volunteer: neoliberal governance and the erasure of poverty inequality. In L. Goode & J. Maskovsky (Eds.), *The New poverty studies: The Ethnography of power, politics and impoverished people in the United States*. New York University Press.

Islam, M. R. 2006. Managing Diverse Land Uses in Coastal Bangladesh: Institutional Approaches . In *Environment and Livelihoods in Tropical Coastal Zones,* eds. C. T. Hoanh, T. P. Tuong, J. W. Growing and B. Hardy, 237-248. CAB International.

Jentoft, S., & Midre G. (2011). The meaning of Poverty: Conceptual Issues in Small-Scale Fisheries Research. In S. Jentoft & A. Eide. *Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small-scale Fisheries*. Verlag (forthcoming)

Junaidi (1991). Tempat Pelelangan Ikan Masalah dan Pengembangannya di Kota Padang.

…….(1992). Dampak Bantuan Paket Teknologi Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Tradisional di Kepulauan Mentawai (Studi Kasus di Desa Malilimok Kec. Siberut Selatan Kab. Padang Pariaman

…….. (1992). Dampak Teknologi Terhadap Effesiensi Usaha Perikanan dengan Purse Seine di Air Bangis Kec. Sei. Beremas Kab. Pasaman

…….. (1994). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional Studi Kasus di Dua Desa Pantai Kec. Sei. Limau Kab. Padang Pariaman.

..... (2005). Kointegrasi Harga Pasaran Tuna di Sumatera Barat, Indonesia.

..... (2008). The Implementation of Auction System on The Price of Tuna Fish in West Sumatera. International Conference 2008 on Quantitative Method Used in Economic and Business at University Malahayaty Lampung.

..... (2012). Marine Product Processing Industries of West Sumatera Expectations and Challenges in Global Marketing. At The International Conference On Competitivenes of Economy In The Global Market (ICCE).

Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.

Kusnadi, 2001. Pengamba Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan. Bandung : Humaniora Utama Press.

Marheni et all (2014) Pengaruh Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Blm) Terhadap Pendapatan Bersih Anggota Kelompok Nelayan Tahun 2012. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014).

Narayan, D., Chambers, R., Shah, M., & Petesh, K. (2000). *Voices of the Poor Crying out for Change.* New York/Washington DC: Oxford University Press/The World Bank.
Odongkara, K. (2005). Poverty in the fisheries: Indicators, causes and Interventions. *Socio- economic Research Report 2* FIRRI. Jinja: LVEMP.

Natalia, M dan Alie, M.M. 2014. kajian kemiskinan pesisir di kota semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok). Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 1 2014.

Nazmar (2013). Model Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil Dengan Pengembangan Off-Fishing di Kota Padang. Disertasi Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Pemusatan Pembangunan Pertanian. Program Pascasarjana. Universitas Andalas Padang.

Nikijulu, V.P.H (2006). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor Tanggal 29 Oktober 2006.

Oktama, R, Z (2013) Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Kelurga Nelayan di Kelurahan Sigih Aras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Oladimeji, Y.U et al. 2014. determinants of poverty among rural artisanal fishery households in kwara state, nigeria . Journal of Sustainable Development in Africa (Volume 16, No.3, 2014) ISSN: 1520-5509.

Pramono, St A, D (2012) Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga. Jejak (Journal of Economics and Policy. Volume 5 No. 2.

Prastyo, A.G . 2010 . Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di jawa tengah tahun 2003-2007). fakultas ekonomi universitas dipoonegoro semarang 2010.

Pritchetet, Suryadi, Sumarto, (2000), Safety Net and Safety Popes: Comparasing the Dinamics Benefit Incidence of Two Indonesia "JPS" Programs, Jakarta: SMERU Reseach Institute.

Pudjiastuti, S (2016) Menteri Susi Ingin Sekolah Tinggi Perikanan Bangun Industri Nasional. Medan Bisnis, Sabtu, 27 Agustus 2016. Rubrik Industri. Halaman 3.

Purnomo, G, S. 2005. Strategi Bertahan Hidup: Respons Nelayan terhadap Perubahan Kondisi Daerah Penangkapan Ikan di Selat Madura. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.

Saidan, C (1998). Peranan Istri Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat di Kelurahan Miskin Kota Padang. (Studi Kasus Kelurahan Sei. Pisang Kec. Bungus Teluk Kabung dan Kelurahan Pasir Ulak Karang Kec. Padang Utara). Tesis Pascasarjana Unand. Tidak di Publikasikan.

Saputra, W, (2007) Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Desian dan Implementasi. Jurnal IPTEKS Terapan. Volume 1 No. 3 Desember 2007.

Sari, D,S, Junaidi, Zein, A (2014) Kajian Tentang Kepemilikan Aset Terhadap Perekonomian Rumah Tangga Nelayan Tradisional di Nagari Tiku Kabupaten Agam. Sumatera Barat

Satria, A, (2009) Pesisir dan Laut Untuk Rakyat. IPB Press.

Silaen, N, Zein, A, dan Junaidi (2010), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Nelayan Tonda Dalam Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Tesis Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

Suhaedy, E, (2016) Siapkan Wirausaha Muda. Masa Depan Indonesia Berada di Laut. Kompas Sabtu, 4 Juni 2016.

Suarta, N. 2013. Pengaruh kapasitas rumah tangga, budaya dan pemberdayaan terhadap sikap serta keberdayaan rumah tangga miskin di kabupaten karangasem nyoman suartha program pascasarjana universitas udayana denpasar 2013.

Sugiyarto, T (2016) Ketimpangan dan Kemiskinan. Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat. Padang Ekspres, Senin, 26 September 2106.

Suharto, E. (2002). Coping Strategies dan Kefungsian Sosial: Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan. Makalah yang Disampaikan pada Seminar" Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Merancang-Kembangkan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Yang Bernuansa Pekerjaan Sosial". Institut Pertanian Bogor.

……,E (2005). “ Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung, Rafika Aditama.

Suherman, A dan Dault, A (2009). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur. Jurnal Saintek Perikanan Vol, 5 No. 1, 2009, 25 – 30.

Sunoto (2012). Industrialisasi Kelautan dan Perikanan dan Blue Economi. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4 Desember 2012.

Suryati (2005). *dalam* Wijayanti, L, Widado, S, dan Ikhsanuddin (2013) Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura.

Trijoyo, K, (2007) “Naskah Akademik Tentang Pembagian Hasil Perikanan.

Ustman, S (2007) Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

World Bank (2003), Kota-Kota dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia, Urban Development Working Papers No. 7.

Yonvitner (2014) Rekontruksi UU sistem bagi hasil perikanan pro nelayan kecil. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol. 1 No. 3 Desember 2014. 192-196. ISSN. 25355 -6226.

Zein, A (1998). The Influence of Technological Change on Income and Social Structure in Artisinal Fisheries in Padang, Indonesia. Disertation. Centre for Tropical Marine Ecology University of Bremen, Germany.

Zein, L, W (2008) Analisis Kontribusi Pendapatan Wanita Nelayan Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Jurnal Mangrove dan Pesisir IX (1), Februari 2009: 12-17 ISSN: 1411-0679.

Tentang Penulis



Dr. Ir. Junaidi, M.Si

Penulis lahir di padang 15 Juli 1959, dari seorang Ibu petani yang bernama Zainar dan seorang ayah yang bernama khaidir yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan di Pantai Pasir Baru Sei. Limau Pariaman. Pada tahun 1962 Ayah hijrah ke Medan Sumatera Utara, maka penulis dibesarkan di Sumatera Utara.

Jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di Sumatera Utara. Pada tahun 1980 memulai pendidikan di jenjang S1 di Fakultas Perikanan Universitas Riau Pekanbaru dengan memilih jurusan Sosial Ekonomi Perikanan.

Menikah pada tahun 1986 dengan seorang gadis Bukittinggi Ir. Besty Lovianda, M.Si yang juga merupakan teman belajar dan berdiskusi pada Fakultas yang sama dan dikaruniakan dua orang putra, Jehan Joenesty Prtama, S.Pi yang merupakan lulusan dari Fakultas Perikanan Universitas Padjajaran Bandung dan Jevon Joenesty Mauladhy sarjana lulusan Komunikasi Program Studi Informasi Kepustakaan Universitas Padjajaran Bandung.

Jenjang pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Andalas Padang pada Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan (PWD) pada tahun 1995, dan S3 di selesaikan di University Putra Malaysia Program Studi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada tahun 2005.

Penulis aktif melakukan pendidikan dan pengajaran pada mahasiswa S1 dan S2, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta menulis ilmiah di jurnal dan media masa khususnya tentang sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Saat ini sebagai Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang. Buku Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang merupakan buku ke-5 yang telah diselesaikan penulis. Buku ini merupakan kolaborasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan penulis bersama tim peneliti yaitu: Dr. Ir. Abdullah Munzir, M.Si dan Dr. Uning Pratimaratri, M.Hum. Ucapan Terimakasih penulis sampaikan kepada Menristek Dikti yang telah memberikan dana Hibah Penelitian selama dua tahun, serta kepada Rektor dan Ketua LPPM yang telah memberikan kesempatan dalam melahirkan buku ini.

ISBN 978-602-7805-49-1

9 786027 805491